



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGESAHAN *TREATY ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS*
(TRAKTAT MENGENAI PELARANGAN SENJATA NUKLIR)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional berkomitmen untuk mendukung upaya pelucutan senjata dan nonproliferasi senjata nuklir melalui pelarangan senjata nuklir dengan menandatangani *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) pada tanggal 20 September 2017 di New York, Amerika Serikat;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara dilakukan dengan Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir);
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

– 2 –

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *TREATY ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS* (TRAKTAT MENGENAI PELARANGAN SENJATA NUKLIR).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 September 2017 di New York, Amerika Serikat.
- (2) Salinan naskah asli *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol, serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 160

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Sekretaris Negara dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN *TREATY ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS*
(TRAKTAT MENGENAI PELARANGAN SENJATA NUKLIR)**

I. UMUM

Kesuksesan agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan umum berkaitan erat dengan situasi keamanan di kawasan dan global. Indonesia telah diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dapat berperan aktif dalam upaya melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam implementasinya, Indonesia telah berkontribusi konkret, baik dalam tataran kawasan maupun global, guna mencapai tujuan dimaksud. Hal ini di antaranya tercermin dari peranan dan kepemimpinan Indonesia dalam isu-isu pelucutan senjata pemusnah massal (*weapons of mass destruction/WMD*). Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional berperan aktif dalam forum internasional yang berkaitan dengan pelucutan, pelarangan, penyebaran, dan pengawasan senjata nuklir.

Keberadaan senjata nuklir berpotensi mengancam perdamaian dunia melalui risiko pecahnya perang nuklir ataupun melalui kesalahan persepsi ancaman keamanan di antara negara pemilik nuklir serta potensi ancaman serangan siber yang dapat memicu terjadinya peluncuran senjata nuklir secara tidak terprediksi baik oleh aktor negara maupun aktor non negara. Seluruh risiko dimaksud dapat berujung pada terjadinya malapetaka nuklir yang berdampak terhadap kemanusiaan secara tanpa pandang bulu dan lintas batas negara, tanpa terkecuali Indonesia.

Sejarah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Sejarah dan riset menunjukkan bahwa ledakan senjata nuklir memberikan dampak sangat buruk dan mengerikan bagi keberlangsungan manusia, kerusakan lingkungan hidup, ancaman terhadap gangguan pasokan makanan, serta hancurnya pembangunan dan perekonomian secara luas dan global.

Malapetaka nuklir juga berdampak secara tidak proporsional dan tanpa pandang bulu terhadap korbannya, khususnya bagi wanita dan anak-anak, bersifat lintas negara, serta berdampak kepada generasi penerusnya melalui paparan radiasi nuklir. Dampak ledakan senjata nuklir demikian tentu tidak sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam *International Humanitarian Law* (Hukum Humaniter Internasional).

Dalam lingkup pengaturan senjata nuklir, rezim multilateral yang saat ini berlaku hanya diatur di bawah *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* yang selanjutnya disingkat NPT yang disepakati tahun 1968. Traktat dimaksud dalam pembentukannya bersifat diskriminatif dengan dikenalkannya dikotomi antara negara pemilik senjata nuklir (*nuclear weapon states*) yang selanjutnya disingkat NWS dan negara bukan pemilik senjata nuklir (*non-nuclear weapon states*) yang selanjutnya disingkat NNWS. NPT merupakan kesepakatan besar (*grand bargain*) bahwa NNWS tidak akan mengembangkan senjata nuklir (nonproliferasi) namun diakui hak berdaulatnya untuk memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai. Sementara itu, NWS berjanji untuk memulai langkah-langkah konkret menuju penghancuran senjata nuklir secara menyeluruh.

Secara substantif, NPT tidak mengatur aspek pelarangan atau membuat tidak sah dari pengembangan, pembuatan, kepemilikan, transfer, penggunaan, dan penyimpanan senjata nuklir. Upaya pelucutan senjata dimaksud hanya didorong secara eksklusif berdasarkan itikad baik (*good faith*) NWS, sebagaimana diatur dalam Pasal VI NPT. Sehingga, tidak terdapat obligasi mengikat dan memaksa secara internasional guna mencapai pelarangan senjata nuklir secara global dalam kerangka waktu yang jelas dan tetap.

Dalam perkembangannya, upaya pelucutan senjata nuklir oleh NWS cenderung mengalami perlambatan hingga saat ini. Hal ini tercermin masih adanya cadangan senjata nuklir meski NPT telah berlaku selama 5 (lima) dekade. Salah satu implementasi komitmen NWS di bawah NPT melalui 64 (enam puluh empat) *action plans* hasil *Review Conference* di tahun 2010 juga tidak menunjukkan kemajuan berarti, bahkan NWS hanya sekedar berkomitmen pada tujuan minimal upaya tersebut.

Perlambatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Perlambatan upaya pelucutan senjata terlihat setelah tahun 2015, ketika pelucutan senjata nuklir mengalami masa percepatan paling terlihat pada periode 1986 – 2008. Kebijakan militer beberapa NWS terkini antara lain Amerika Serikat, Rusia, dan Inggris bahkan mengindikasikan munculnya kembali upaya perlombaan senjata nuklir baru (*new arms race*).

Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa jaminan yang paling efektif terhadap keberadaan ancaman dan penggunaan senjata nuklir adalah pelarangan senjata nuklir tanpa syarat, mengikat secara hukum, nondiskriminatif, dan berlaku bagi semua negara tanpa terkecuali. Pemerintah Indonesia juga mendukung pemanfaatan energi nuklir hanya untuk tujuan damai dan akses terhadap kemampuan dan teknologi untuk tujuan dimaksud merupakan hak berdaulat setiap negara.

Gambaran riil dari perlambatan upaya pelucutan senjata nuklir secara komprehensif telah memberikan dorongan politis kepada NNWS guna mencari pendekatan baru yang inklusif dalam upaya menciptakan dunia yang terbebas dari ancaman penggunaan dan keberadaan senjata nuklir. Elemen utama yang perlu diperkuat dan diimplementasikan pada rezim multilateral guna mencapai tujuan akhir dimaksud yang tidak dicakup oleh NPT adalah dengan memberikan kewajiban moral yang mengikat semua negara guna membuat tidak sah dan melarang pengembangan, pembuatan, kepemilikan, transfer, penggunaan, dan penyimpanan senjata nuklir.

Pendekatan tersebut meletakkan hak hidup damai terbebas dari ancaman ledakan senjata nuklir sebagai barang milik bersama (*public goods*) yang berhak diakses oleh setiap manusia. Hal ini berbeda dengan perspektif keamanan yang selama ini berlaku, termasuk pada NPT, dan justru menjadi batu sandungan dalam memajukan agenda pelucutan senjata nuklir secara komprehensif.

Prinsip tersebut yang menjadi dasar dukungan dan peran aktif Pemerintah Indonesia dalam proses pembahasan dan adopsi *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir), yang selanjutnya disingkat TPNW. TPNW sebagai suatu kerangka hukum internasional dinilai secara komprehensif mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut upaya membuat tidak sah dan pelarangan senjata nuklir secara global, serta jaminan hak berdaulat setiap negara untuk memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai.

Proses . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

– 4 –

Proses negosiasi TPNW diselenggarakan melalui konferensi yang dibentuk melalui Resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/71/258 tahun 2016. Konferensi dimaksud berlangsung dalam 2 (dua) sesi di New York, Amerika Serikat saat Indonesia berperan sebagai salah satu Wakil Presiden mewakili kawasan Asia Pasifik. Konferensi negosiasi TPNW berhasil mengadopsi Traktat dimaksud pada tanggal 7 Juli 2017 melalui pemungutan suara dengan 122 (seratus dua puluh dua) negara mendukung, 1 (satu) negara menolak yaitu Belanda dan 1 (satu) negara abstain yaitu Singapura.

TPNW dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 20 September 2017 disela-sela *High Level Week* Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-72 tahun 2017, saat itu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mewakili Pemerintah Indonesia telah menandatangani Traktat tersebut. TPNW mulai berlaku atau *entry into force* tanggal 22 Januari 2021. Sejak diadopsi hingga September 2023, telah terdapat 93 (sembilan puluh tiga) negara yang menandatangani TPNW dan 69 (enam puluh sembilan) di antaranya telah meratifikasi dengan Bahamas menjadi negara terakhir yang menandatangani pada tanggal 19 September 2023. Di kawasan Asia Tenggara, Laos, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Filipina juga telah meratifikasi TPNW.

Melihat perkembangan pemberlakuan dan universalisasi TPNW serta peran aktif Indonesia dalam memprakarsai Traktat dimaksud sesuai dengan pandangan dan prinsip kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia dalam agenda pelucutan senjata nuklir secara komprehensif, penting bagi Pemerintah Republik Indonesia selaku salah satu penandatanganan awal Traktat dimaksud pada tahun 2017 untuk mengesahkannya melalui Undang-Undang. Upaya pengesahan juga didasarkan kepada Pasal 5 TPNW yang meminta setiap negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melaksanakan kewajibannya berdasarkan Traktat tersebut.

Bagi Indonesia, TPNW akan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong etika internasional yang menggarisbawahi bahaya nyata senjata nuklir terhadap kemanusiaan. Langkah pengesahan juga akan memperluas terciptanya kawasan bebas senjata nuklir dan peluang guna mempromosikan kepentingan politik luar negeri Indonesia, terutama terkait komitmen terhadap implementasi yang seimbang antara agenda pelucutan senjata nuklir, nonproliferasi, dan hak pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.

TPNW . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

TPNW akan melengkapi komitmen nasional dalam tujuan dimaksud, khususnya terhadap pengesahan *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty* yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012, *Comprehensive Safeguards Agreement* dan *Additional Protocol* dari *International Atomic Energy Agency* (Badan Tenaga Atom Internasional), serta *Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone* (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997.

Lebih lanjut, pengesahan TPNW akan menjadi dasar legitimasi dalam penguatan regulasi nasional yang mengatur pelarangan, kriminalisasi, serta membuat tidak sah upaya pengembangan, pemilikan, dan penggunaan senjata nuklir secara nasional, sebagaimana dimandatkan Pasal 5 Traktat dimaksud. Undang-Undang mengenai pengesahan TPNW dapat menjadi dasar yang solid atas proses amendemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran yang sedang berlangsung. Hal ini mengingat Undang-Undang dimaksud belum mengatur secara spesifik elemen membuat tidak sah dan kriminalisasi dari pengembangan, pembuatan, kepemilikan, transfer, penggunaan dan penyimpanan senjata nuklir.

Selain itu, pengesahan TPNW oleh Pemerintah Indonesia diharapkan akan bersifat demonstratif, menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk mengupayakan pelucutan senjata nuklir, sekaligus untuk memberikan contoh yang kuat bagi negara-negara lain agar mengikuti langkah Indonesia untuk segera meratifikasi Traktat dimaksud. Pengesahan dapat menjadi upaya penggalangan terhadap proses yang sama oleh negara lainnya sehingga dapat mendorong percepatan berlakunya TPNW.

Bagi Indonesia, pengesahan TPNW memberikan manfaat sebagai berikut:

1. memperkuat dasar hukum bagi Indonesia dalam mendukung upaya global untuk melarang/kriminalisasi senjata nuklir, yang mencakup antara lain pengembangan, pengujian, produksi, manufaktur, kepemilikan, penimbunan, transfer, penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir;
2. memperkuat posisi Indonesia dalam mendukung penerapan etika dan norma internasional terkait dampak destruktif dan bahaya senjata nuklir terhadap kemanusiaan;

3. memberikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

3. memberikan tekanan politis dan moral terhadap negara-negara pemilik senjata nuklir untuk secara konsisten melaksanakan komitmen pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh;
4. memberikan tekanan politis dan moral terhadap negara-negara pemilik senjata nuklir untuk tidak melakukan modernisasi persenjataan nuklir dan sarana peluncurnya dengan teknologi terkini, serta mengeluarkan senjata nuklir dari doktrin pertahanannya;
5. meningkatkan citra dan peran konstruktif Indonesia di tingkat nasional, regional, dan global dalam mendorong implementasi yang seimbang antara agenda pelucutan senjata nuklir, nonproliferasi, serta pemanfaatan energi dan teknologi nuklir untuk tujuan damai;
6. melengkapi komitmen nasional dalam mendorong keseimbangan implementasi agenda dimaksud, khususnya terhadap ratifikasi dan akses *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*, *Comprehensive Safeguards Agreement* dan *Additional Protocol* dari *International Atomic Energy Agency* (Badan Tenaga Atom Internasional), dan *Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone*;
7. memberikan penekanan pentingnya kawasan Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang stabil dan terbebas dari perlombaan senjata, termasuk senjata nuklir;
8. menegaskan kembali komitmen Indonesia bahwa hak berdaulat untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi dan teknologi nuklir di Indonesia digunakan semata-mata untuk tujuan damai; dan
9. menunjukkan konsistensi Indonesia sebagai negara pihak pada Konvensi Jenewa 1949 dalam memastikan penghormatan nasional terhadap hukum humaniter internasional. Salah satu materi yang diatur oleh Konvensi Jenewa 1949 adalah perlindungan terhadap penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata. Pengesahan TPNW juga akan menunjukkan penghormatan nasional terhadap 3 (tiga) prinsip utama hukum humaniter internasional yang sudah dianggap sebagai kebiasaan hukum internasional, yaitu prinsip pembatasan, prinsip pembeda, dan prinsip proporsionalitas.

Pokok-pokok isi Traktat sebagai berikut:

1. Tujuan.

Traktat bertujuan sebagai suatu kerangka hukum internasional yang secara komprehensif mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut upaya membuat tidak sah dan pelarangan senjata nuklir secara global, serta jaminan hak berdaulat setiap negara untuk memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai.

2. Ruang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

2. Ruang lingkup.
Ruang lingkup yang diatur oleh Traktat di antaranya terkait larangan, deklarasi, pengamanan, upaya penghapusan menyeluruh senjata nuklir, implementasi nasional, kerja sama dan bantuan internasional, rapat, pembiayaan, proses amendemen, penyelesaian sengketa, universalitas, penandatanganan, ratifikasi, pemberlakuan, reservasi, penarikan diri Traktat, hubungan dengan perjanjian lain, pihak penyimpan, dan teks asli.
3. Kewajiban Negara Pihak untuk:
 - a. tidak mengembangkan, menguji, memproduksi, manufaktur, membeli, menguasai atau menimbun persediaan, memindahkan atau menerima pemindahan, menggunakan atau mengancam untuk menggunakan, membantu, mendukung atau membujuk, mencari atau menerima segala bantuan, memberikan perizinan, atau terlibat dalam segala aktivitas yang dilarang dalam kaitannya dengan senjata nuklir atau perangkat peledak nuklir lainnya di wilayah yuridiksi masing-masing sesuai dengan yang diatur di dalam Traktat;
 - b. melaporkan kepemilikan senjata nuklir terdahulu dan penghapusan program kepada Sekretaris Jenderal PBB sebelum berlakunya Traktat;
 - c. mematuhi *safeguards* dan instrumen lainnya milik Badan Tenaga Atom Internasional dalam bentuk *Comprehensive Safeguards Agreement*;
 - d. memverifikasi penghapusan program senjata nuklir melalui kerja sama dengan otoritas internasional yang kompeten dan hasilnya dilaporkan kepada Negara-negara Pihak yang diharapkan dapat dilakukan sebelum pertemuan pertama Negara Pihak;
 - e. mengadopsi langkah hukum, administrasi, dan upaya lain dalam wilayahnya untuk mencegah dan menekan aktivitas yang dilarang di dalam Traktat;
 - f. untuk memberikan bantuan yang cukup tanpa diskriminasi kepada korban ledakan senjata nuklir serta bantuan terhadap dampak lingkungan akibat kegiatan pengujian atau penggunaan senjata nuklir atau peledak nuklir lainnya;
 - g. bekerja sama dengan Negara Pihak lain dalam pemberian dan permintaan bantuan akibat penggunaan atau pengujian senjata nuklir; dan
 - h. menghadiri pertemuan Negara Pihak dan konferensi ulasan bagi Negara non-Pihak, badan terkait di PBB, organisasi internasional, dan organisasi nonpemerintah sebagai pengamat.

II. PASAL . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

– 8 –

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6903



معاهدة بشأن حظر الأسلحة النووية

禁止核武器条约

TREATY ON THE PROHIBITION OF
NUCLEAR WEAPONS

TRAITÉ SUR L'INTERDICTION
DES ARMES NUCLÉAIRES

ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN
DE LAS ARMAS NUCLEARES



禁止核武器条约



联合国
2017 年

禁止核武器条约

本条约缔约国，

决心为实现《联合国宪章》的宗旨和原则作出贡献，

深切关注使用核武器将造成的灾难性人道主义后果，因此认识到需要彻底消除此种武器，这仍然是保证在任何情况下不再次使用核武器的唯一途径，

铭记核武器继续存在，包括意外事故、错误判断或蓄意所为造成核武器爆炸构成的风险，并强调这些风险关乎全人类安全，所有国家都有责任防止使用核武器，

认识到核武器的灾难性后果无法充分应对，超越国界，对人类生存、环境、社会经济发展、全球经济、粮食安全以及今世后代的健康造成严重影响，并尤其对妇女和女童造成巨大影响，包括因电离辐射造成的影响，

承认实现核裁军的道德责任以及建立和维持一个无核武器世界的紧迫性，无核武器世界是符合国家和集体安全利益的最高全球公益物，

铭记对核武器受害者(原爆幸存者)以及受核武器试验影响民众所造成的不可接受的痛苦和伤害，

认识到核武器活动对土著人民造成尤其巨大的影响，

重申所有国家在任何时候都应遵守适用的国际法，包括国际人道主义法和国际人权法，

以国际人道主义法原则和规则，尤其是武装冲突方选择作战方法或手段的权利并非不受限制原则、区分规则、禁止滥杀滥伤攻击规则、攻击行动相称性和攻击行动中采取预防措施规则、禁止使用可造成过度伤害或不必要痛苦武器规则、以及保护自然环境规则为基础，

考虑到使用核武器将违反适用于武装冲突的国际法规则，特别是国际人道主义法的原则和规则，

重申使用核武器也将严重违背人道原则和公众良心要求，

回顾根据《联合国宪章》，各国在其国际关系中不应进行武力威胁或使用武力，或以违背联合国宗旨的任何其他方式，侵犯他国的领土完整或政治独立，应促进建立并维护国际和平与安全，尽量减少用于军备的世界人力及经济资源，

回顾 1946 年 1 月 24 日通过的联合国大会第一号决议及其后呼吁消除核武器的各项决议，关切核裁军步伐缓慢，军事及安全观念、理论和政策继续依靠核武器，核武器生产、维持和现代化计划浪费经济及人力资源，

认识到以具有法律约束力的方式禁止核武器是对实现和维护一个无核武器世界，包括以不可逆转、可核查、透明方式消除核武器的重要贡献，并决心为此目的采取行动，

决心采取行动，以在严格有效的国际监督下推动全面彻底裁军取得有效进展，
重申有义务真诚进行和完成谈判，以在严格有效的国际监督下实现全面核裁军，
又重申充分有效地执行作为核裁军和不扩散制度基石的《不扩散核武器条约》，对促进国际和平与安全具有至关重要的作用，

认识到《全面禁止核试验条约》及其核查制度作为核裁军和不扩散制度的核心要素极为重要，

重申深信根据有关区域国家自由达成的安排建立国际公认的无核武器区，能够增进全球和区域的和平与安全，加强核不扩散制度，有助于实现核裁军目标，

强调本条约的任何规定不得解释为影响缔约国不受歧视地为和平目的研究、生产、使用核能的不可剥夺的权利，

认识到妇女和男子的平等、充分、有效参与是促进和实现可持续和平与安全的重要因素，并致力于支持和加强妇女对核裁军的有效参与，

认识到全面和平与裁军教育以及提高今世后代对核武器风险后果的认识十分重要，并致力于宣传本条约的原则和准则，

强调指出有关彻底消除核武器的呼吁证明了公众良心在增进人道原则方面的作用，并承认联合国、国际红十字与红新月运动、其他国际和区域组织、非政府组织、宗教领袖、议员、学者和原爆炸幸存者为此作出的努力，

兹议定如下：

第 1 条

禁止

1. 各缔约国承诺在任何情况下：

(a) 不发展、生产、制造或以其他方式获得、拥有或储存核武器或其他核爆炸装置；

(b) 不直接或间接向任何接受者转让核武器或其他核爆炸装置或对此种武器或爆炸装置的控制权；

(c) 不直接或间接接受核武器或其他核爆炸装置的转让或对此种武器或爆炸装置的控制权；

(d) 不使用或威胁使用核武器和其他核爆炸装置；

(e) 不以任何方式协助、鼓励或诱导任何人从事本条约禁止缔约国从事的活动；

(f) 不以任何方式寻求或接受任何人为从事本条约禁止缔约国从事的活动而提供的援助；

(g) 不允许在其领土或其管辖或控制的任何地方安置、安装或部署核武器或其他核爆炸装置。

第 2 条

宣布

1. 各缔约国应在本条约对该缔约国生效之日起 30 天内向联合国秘书长提交宣布，其中应：

(a) 宣布在本条约对该缔约国生效前其是否拥有、持有或控制核武器或核爆炸装置，并已消除其核武器计划，包括消除所有核武器设施或以不可逆转方式改变其用途；

(b) 尽管有第 1 条(a)款的规定，宣布是否拥有、持有或控制任何武器或其他核爆炸装置；

(c) 尽管有第 1 条(g)款的规定，宣布在其领土或其管辖或控制的任何地方是否存在其他国家拥有、持有或控制的核武器或其他核爆炸装置。

2. 联合国秘书长应将收到的所有此种宣布转交缔约国。

第 3 条

保障监督

1. 第 4 条第 1 款或第 2 款不适用的各缔约国，应至少维持本条约生效时已有的国际原子能机构保障监督义务，但不影响其将来可能通过的其他相关文书。

2. 第 4 条第 1 款或第 2 款不适用并尚未采取此种行动的各缔约国，应与国际原子能机构签订全面保障监督协定(INFCIRC/153(更正版))并使之生效。应在本条约

对该条约国生效之日起 180 天内开始就此项协定进行谈判。协定应在本条约对该条约国生效之日起 18 个月内生效。此后，各条约国应维持此种义务，但不影响其将来可能通过的其他相关文书。

第 4 条

逐步实现彻底消除核武器

1. 在本条约对其生效前并在 2017 年 7 月 7 日后拥有、持有或控制核武器或其他核爆炸装置并已消除核武器计划，包括消除所有核武器设施或以不可逆转方式改变其用途的各条约国，应与依照本条第 6 款规定指定的国际主管当局合作，目的是核查以不可逆转方式消除其核武器计划的情况。该国际主管当局应向条约国报告情况。该条约国应与国际原子能机构签订保障监督协定以提供充分、可信的保证，不改变已申报核材料的和平核活动用途，并保证该条约国全国境内没有未申报的核材料或核活动。此种协定的谈判应在本条约对该条约国生效之日起 180 天内开始。协定应在本条约对该条约国生效之日起第 18 个月内生效。此后，该条约国应至少维持此种保障监督义务，但不影响其今后可能通过的其他相关文书。

2. 尽管有第 1 条(a)款的规定，拥有、持有或控制核武器或其他核爆炸装置各条约国，应按照一份具有法律约束力、有时限的经核查并以不可逆转方式消除该条约国核武器，包括消除所有核武器设施或以不可逆转方式改变其用途的计划，立即解除其战备状态，尽快并在第一次条约国会议确定的最后期限之前销毁核武器或其他核爆炸装置。该条约国应在本条约对其生效之日起 60 天内向条约国会议或条约国指定的国际主管当局提交此份计划。此后，应与国际主管当局就此份计划进行谈判，该主管当局应将此份计划提交下次条约国会议或审议大会，即二者中先举行的会议，由其依照议事规则核准。

3. 第 2 条适用的条约国应与国际原子能机构签订一项保障监督协定以提供充分、可信的保证，不改变已申报核材料的和平核活动用途，保证在该国全国境内没有未申报的核材料或核活动。此种协定应在第 2 款所述计划执行完成之日起开始谈判。协定应在谈判开始之日起 18 个月内生效。此后，该条约国应至少维持此种保障监督义务，但不影响其今后可能通过的其他相关文书。本款所述协定生效后，条约国应向联合国秘书长提交最后宣布，表示其已经履行本条规定的义务。

4. 尽管有第 1 条(b)款和第 1 条(g)款的规定，其领土或其管辖或控制任何地方有其他国家拥有、持有或控制的核武器或其他核爆炸装置的各缔约国，应确保尽快并在第一次缔约国会议确定的最后期限之前立即移除此种武器。在此种武器或其他爆炸装置移除后，该缔约国应向联合国秘书长提交宣布，表示其已经履行本条规定的义务。

5. 本条适用的各缔约国，应向每次缔约国会议和每次审议大会报告本条义务的履行进展，直至义务履行完毕。

6. 缔约国应依照本条第 1 款、第 2 款和第 3 款的规定，指定一个或多个国际主管当局，谈判以不可逆转方式消除核武器计划，包括消除所有核武器设施或以不可逆转方式改变其用途并核查此种情况。如在本条约对本条第 1 款或第 2 款适用的缔约国生效之前尚未作出此种指定，联合国秘书长应召开一次缔约国特别会议，以作出可能要求作出的任何决定。

第 5 条

国家履行

1. 各缔约国应采取必要措施，履行本条约规定的义务。
2. 各缔约国应采取一切适当的法律、行政和其他措施，包括实施刑事制裁，防止和制止缔约国个人或在其管辖或控制的领土从事本条约禁止缔约国从事的任何活动。

第 6 条

受害人援助和环境补救

1. 各缔约国应根据适用的国际人道主义法和人权法，对其管辖地区内受核武器使用或试验影响的个人，不受歧视地充分提供与年龄和性别相称的援助，包括医疗、康复和心理支持，并为其融入社会与经济提供协助。
2. 各缔约国对其管辖或控制的因核武器或其他核爆炸装置试验或使用活动而受污染的地区，应采取必要和适当措施对污染地区进行环境补救。
3. 上述第 1 款和第 2 款规定的义务，应不影响其他国家根据国际法或双边协定承担的责任和义务。

第 7 条

国际合作与援助

1. 各缔约国应与其他缔约国合作，为履行本条约提供便利。
2. 各缔约国在履行本条约义务时，应有权在可行的情况下寻求并接受其他缔约国的援助。
3. 能这样做的缔约国应向受核武器使用或试验影响的缔约国提供技术、物质和财政援助，以进一步履行本条约。
4. 能这样做的缔约国应向受核武器或其他核爆炸装置使用或试验影响的受害者提供援助。
5. 本条规定的援助可通过联合国系统、国际、区域或国家组织或机构、非政府组织或机构、红十字国际委员会、红十字会与红新月会国际联合会、国家红十字与红新月会等机构或以双边方式提供。
6. 在不影响其根据国际法承担的其他责任或义务的情况下，曾经使用或试验核武器或其他核爆炸装置的缔约国，应有责任以受害者援助和环境补救为目的向受影响缔约国提供充分援助。

第 8 条

缔约国会议

1. 缔约国应定期举行会议，以依照其相关规定审议有关本条约适用或执行情况的事项以及核裁军方面的进一步措施，并在必要时就此作出决定，其中包括：
 - (a) 本条约的执行情况和现状；
 - (b) 以经核查、有时限、不可逆转方式消除核武器计划的措施，包括本条约的附加议定书；
 - (c) 与依照及符合本条约规定的任何其他事项。
2. 联合国秘书长应在本条约生效之日起一年内召开第一次缔约国会议。此后，联合国秘书长应每两年召开一次缔约国会议，除非缔约国另有约定。缔约国会议首次会议应通过议事规则。在议事规则通过前，应采用谈判一项具有法律约束力的禁止核武器并导致彻底消除核武器的文书的联合国会议的议事规则。

3. 联合国秘书长应该应任何缔约国的书面请求召开缔约国特别会议，但此一请求应得到至少三分之一缔约国的支持。

4. 本条约生效五年后，联合国秘书长应召开一次大会，审查本条约运作情况和本条约宗旨实现进展。此后，联合国秘书长应每六年召开一次目的相同的审议大会，除非缔约国另有商定。

5. 非本条约缔约国以及联合国系统有关实体、其他有关国际组织或机构、区域组织、红十字国际委员会、红十字会与红新月会国际联合会及有关非政府组织，应受邀以观察员身份出席缔约国会议和审议大会。

第 9 条

费用

1. 缔约国会议、审议大会和缔约国特别会议的费用，应由缔约国及以观察员身份参加会议的非本条约缔约国按照经适当调整的联合国会费分摊比额表承担。

2. 联合国秘书长依照本条约第 2 条规定分发宣布、依照第 4 条规定编写报告、依照第 10 条提出修正案而产生的费用，应由缔约国按照经适当调整的联合国会费分摊比额表承担。

3. 执行第 4 条规定的核查措施的费用以及与销毁核武器或其他核爆炸装置以及消除核武器计划，包括消除所有核武器设施或改变其用途的费用，应由产生此种费用的缔约国承担。

第 10 条

修正

1. 本条约生效后，任何缔约国可随时对本条约提出修正。提出的修正案文应通知联合国秘书长，由其分发所有缔约国，并就是否审议修正案文征求意见。如大多数缔约国在修正案文分发后 90 天内通知联合国秘书长支持进一步审议，修正案文应由下次缔约国会议或审议大会，即二者中先举行的会议，进行审议。

2. 缔约国会议或审议大会可商定修正案，修正案应以三分之二缔约国多数赞成票通过。保存人应将通过的修正案通知所有缔约国。

3. 修正案应在大多数缔约国交存批准书或接受书之日起 90 天后对交存批准书或接受书的各缔约国生效。此后，修正案将在其他缔约国交存批准书或接受书之日起 90 天后对其生效。

第 11 条

争端解决

1. 当两个或两个以上缔约国因本条约的解释或适用发生争端时，有关各方应共同协商，依照《联合国宪章》第三十三条的规定，通过谈判或以当事方选择的其他和平方式解决争端。

2. 缔约国会议可依照本条约和《联合国宪章》的相关规定协助解决争端，包括提供斡旋，呼吁有关缔约国启动其选择的和解程序，并就商定程序的时限提出建议。

第 12 条

普遍性

各缔约国应鼓励非本条约缔约国签署、批准、接受、核准或加入本条约，以实现所有国家普遍遵守本条约的目标。

第 13 条

签署

本条约应从 2017 年 9 月 20 日起在纽约总部开放供所有国家签署。

第 14 条

批准、接受、核准或加入

本条约须经签署国批准、接受或核准。本条约应开放供加入。

第 15 条

生效

1. 本条约应在第五十份批准书、接受书、核准书或加入书交存之日起 90 天后生效。

2. 对于在第五十份批准书、接受书、核准书或加入书交存之日后交存批准书、接受书、核准书或加入书的国家，本条约在该缔约国交存批准书、接受书、核准书或加入书之日起 90 天后对其生效。

第 16 条

保留

本条约各项条款不接受保留。

第 17 条

期限和退出

1. 本条约应无限期有效。

2. 各缔约国如断定与本条约主题有关的非常事件已危及其国家的最高利益，为行使其国家主权，应有权退出本条约。各缔约国应向保存人提出退出通知。此项通知应包含一份关于该国认为已危及其最高利益的非常事件的说明。

3. 此一退出应在保存人收到退出通知之日起 12 个月后生效。但是，如果 12 个月的期限届满，退出的缔约国为武装冲突当事国，该缔约国应继续接受本条约及任何其他议定书的义务的约束，直至其不再是武装冲突当事国。

第 18 条

与其他协定的关系

执行本条约不应妨碍缔约国根据其现有国际协定承担的与本条约义务相一致的义务。

第 19 条

保存

兹指定联合国秘书长为本条约保存人。

第 20 条

有效文本

本条约的阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文、西班牙文文本具有同等效力。

二〇一七年七月七日，订于纽约。

TREATY ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS



UNITED NATIONS
2017

TREATY ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS

The States Parties to this Treaty,

Determined to contribute to the realization of the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Deeply concerned about the catastrophic humanitarian consequences that would result from any use of nuclear weapons, and recognizing the consequent need to completely eliminate such weapons, which remains the only way to guarantee that nuclear weapons are never used again under any circumstances,

Mindful of the risks posed by the continued existence of nuclear weapons, including from any nuclear-weapon detonation by accident, miscalculation or design, and emphasizing that these risks concern the security of all humanity, and that all States share the responsibility to prevent any use of nuclear weapons,

Cognizant that the catastrophic consequences of nuclear weapons cannot be adequately addressed, transcend national borders, pose grave implications for human survival, the environment, socioeconomic development, the global economy, food security and the health of current and future generations, and have a disproportionate impact on women and girls, including as a result of ionizing radiation,

Acknowledging the ethical imperatives for nuclear disarmament and the urgency of achieving and maintaining a nuclear-weapon-free world, which is a global public good of the highest order, serving both national and collective security interests,

Mindful of the unacceptable suffering of and harm caused to the victims of the use of nuclear weapons (hibakusha), as well as of those affected by the testing of nuclear weapons,

Recognizing the disproportionate impact of nuclear-weapon activities on indigenous peoples,

Reaffirming the need for all States at all times to comply with applicable international law, including international humanitarian law and international human rights law,

Basing themselves on the principles and rules of international humanitarian law, in particular the principle that the right of parties to an armed conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited, the rule of distinction, the prohibition against indiscriminate attacks, the rules on proportionality and precautions in attack, the prohibition on the use of weapons of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering, and the rules for the protection of the natural environment,

Considering that any use of nuclear weapons would be contrary to the rules of international law applicable in armed conflict, in particular the principles and rules of international humanitarian law,

Reaffirming that any use of nuclear weapons would also be abhorrent to the principles of humanity and the dictates of public conscience,

Recalling that, in accordance with the Charter of the United Nations, States must refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations, and that the establishment and maintenance of international peace and security are to be promoted with the least diversion for armaments of the world's human and economic resources,

Recalling also the first resolution of the General Assembly of the United Nations, adopted on 24 January 1946, and subsequent resolutions which call for the elimination of nuclear weapons,

Concerned by the slow pace of nuclear disarmament, the continued reliance on nuclear weapons in military and security concepts, doctrines and policies, and the waste of economic and human resources on programmes for the production, maintenance and modernization of nuclear weapons,

Recognizing that a legally binding prohibition of nuclear weapons constitutes an important contribution towards the achievement and maintenance of a world free of nuclear weapons, including the irreversible, verifiable and transparent elimination of nuclear weapons, and determined to act towards that end,

Determined to act with a view to achieving effective progress towards general and complete disarmament under strict and effective international control,

Reaffirming that there exists an obligation to pursue in good faith and bring to a conclusion negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and effective international control,

Reaffirming also that the full and effective implementation of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, which serves as the cornerstone of the nuclear disarmament and non-proliferation regime, has a vital role to play in promoting international peace and security,

Recognizing the vital importance of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty and its verification regime as a core element of the nuclear disarmament and non-proliferation regime,

Reaffirming the conviction that the establishment of the internationally recognized nuclear-weapon-free zones on the basis of arrangements freely arrived at among the States of the region concerned enhances global and regional peace and security, strengthens the nuclear non-proliferation regime and contributes towards realizing the objective of nuclear disarmament,

Emphasizing that nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of its States Parties to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination,

Recognizing that the equal, full and effective participation of both women and men is an essential factor for the promotion and attainment of sustainable peace and security, and committed to supporting and strengthening the effective participation of women in nuclear disarmament,

Recognizing also the importance of peace and disarmament education in all its aspects and of raising awareness of the risks and consequences of nuclear weapons for current and future generations, and committed to the dissemination of the principles and norms of this Treaty,

Stressing the role of public conscience in the furthering of the principles of humanity as evidenced by the call for the total elimination of nuclear weapons, and recognizing the efforts to that end undertaken by the United Nations, the International Red Cross and Red Crescent Movement, other international and regional organizations, non-governmental organizations, religious leaders, parliamentarians, academics and the hibakusha,

Have agreed as follows:

Article 1

Prohibitions

1. Each State Party undertakes never under any circumstances to:
 - (a) Develop, test, produce, manufacture, otherwise acquire, possess or stockpile nuclear weapons or other nuclear explosive devices;
 - (b) Transfer to any recipient whatsoever nuclear weapons or other nuclear explosive devices or control over such weapons or explosive devices directly or indirectly;
 - (c) Receive the transfer of or control over nuclear weapons or other nuclear explosive devices directly or indirectly;
 - (d) Use or threaten to use nuclear weapons or other nuclear explosive devices;
 - (e) Assist, encourage or induce, in any way, anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Treaty;
 - (f) Seek or receive any assistance, in any way, from anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Treaty;
 - (g) Allow any stationing, installation or deployment of any nuclear weapons or other nuclear explosive devices in its territory or at any place under its jurisdiction or control.

Article 2

Declarations

1. Each State Party shall submit to the Secretary-General of the United Nations, not later than 30 days after this Treaty enters into force for that State Party, a declaration in which it shall:

(a) Declare whether it owned, possessed or controlled nuclear weapons or nuclear explosive devices and eliminated its nuclear-weapon programme, including the elimination or irreversible conversion of all nuclear-weapons-related facilities, prior to the entry into force of this Treaty for that State Party;

(b) Notwithstanding Article 1 (a), declare whether it owns, possesses or controls any nuclear weapons or other nuclear explosive devices;

(c) Notwithstanding Article 1 (g), declare whether there are any nuclear weapons or other nuclear explosive devices in its territory or in any place under its jurisdiction or control that are owned, possessed or controlled by another State.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit all such declarations received to the States Parties.

Article 3

Safeguards

1. Each State Party to which Article 4, paragraph 1 or 2, does not apply shall, at a minimum, maintain its International Atomic Energy Agency safeguards obligations in force at the time of entry into force of this Treaty, without prejudice to any additional relevant instruments that it may adopt in the future.

2. Each State Party to which Article 4, paragraph 1 or 2, does not apply that has not yet done so shall conclude with the International Atomic Energy Agency and bring into force a comprehensive safeguards agreement (INFCIRC/153 (Corrected)). Negotiation of such agreement shall commence within 180 days from the entry into force of this Treaty for that State Party. The agreement shall enter into force no later than 18 months from the entry into force of this Treaty for that State Party. Each State Party shall thereafter maintain such obligations, without prejudice to any additional relevant instruments that it may adopt in the future.

Article 4

Towards the total elimination of nuclear weapons

1. Each State Party that after 7 July 2017 owned, possessed or controlled nuclear weapons or other nuclear explosive devices and eliminated its nuclear-weapon programme, including the elimination or irreversible conversion of all nuclear-weapons-related facilities, prior to the entry into force of this Treaty for it, shall cooperate with the competent international authority designated pursuant to

paragraph 6 of this Article for the purpose of verifying the irreversible elimination of its nuclear-weapon programme. The competent international authority shall report to the States Parties. Such a State Party shall conclude a safeguards agreement with the International Atomic Energy Agency sufficient to provide credible assurance of the non-diversion of declared nuclear material from peaceful nuclear activities and of the absence of undeclared nuclear material or activities in that State Party as a whole. Negotiation of such agreement shall commence within 180 days from the entry into force of this Treaty for that State Party. The agreement shall enter into force no later than 18 months from the entry into force of this Treaty for that State Party. That State Party shall thereafter, at a minimum, maintain these safeguards obligations, without prejudice to any additional relevant instruments that it may adopt in the future.

2. Notwithstanding Article 1 (a), each State Party that owns, possesses or controls nuclear weapons or other nuclear explosive devices shall immediately remove them from operational status, and destroy them as soon as possible but not later than a deadline to be determined by the first meeting of States Parties, in accordance with a legally binding, time-bound plan for the verified and irreversible elimination of that State Party's nuclear-weapon programme, including the elimination or irreversible conversion of all nuclear-weapons-related facilities. The State Party, no later than 60 days after the entry into force of this Treaty for that State Party, shall submit this plan to the States Parties or to a competent international authority designated by the States Parties. The plan shall then be negotiated with the competent international authority, which shall submit it to the subsequent meeting of States Parties or review conference, whichever comes first, for approval in accordance with its rules of procedure.

3. A State Party to which paragraph 2 above applies shall conclude a safeguards agreement with the International Atomic Energy Agency sufficient to provide credible assurance of the non-diversion of declared nuclear material from peaceful nuclear activities and of the absence of undeclared nuclear material or activities in the State as a whole. Negotiation of such agreement shall commence no later than the date upon which implementation of the plan referred to in paragraph 2 is completed. The agreement shall enter into force no later than 18 months after the date of initiation of negotiations. That State Party shall thereafter, at a minimum, maintain these safeguards obligations, without prejudice to any additional relevant instruments that it may adopt in the future. Following the entry into force of the agreement referred to in this paragraph, the State Party shall submit to the Secretary-General of the United Nations a final declaration that it has fulfilled its obligations under this Article.

4. Notwithstanding Article 1 (b) and (g), each State Party that has any nuclear weapons or other nuclear explosive devices in its territory or in any place under its jurisdiction or control that are owned, possessed or controlled by another State shall ensure the prompt removal of such weapons, as soon as possible but not later than a deadline to be determined by the first meeting of States Parties. Upon the removal of such weapons or other explosive devices, that State Party shall submit to the

Secretary-General of the United Nations a declaration that it has fulfilled its obligations under this Article.

5. Each State Party to which this Article applies shall submit a report to each meeting of States Parties and each review conference on the progress made towards the implementation of its obligations under this Article, until such time as they are fulfilled.

6. The States Parties shall designate a competent international authority or authorities to negotiate and verify the irreversible elimination of nuclear-weapons programmes, including the elimination or irreversible conversion of all nuclear-weapons-related facilities in accordance with paragraphs 1, 2 and 3 of this Article. In the event that such a designation has not been made prior to the entry into force of this Treaty for a State Party to which paragraph 1 or 2 of this Article applies, the Secretary-General of the United Nations shall convene an extraordinary meeting of States Parties to take any decisions that may be required.

Article 5

National implementation

1. Each State Party shall adopt the necessary measures to implement its obligations under this Treaty.

2. Each State Party shall take all appropriate legal, administrative and other measures, including the imposition of penal sanctions, to prevent and suppress any activity prohibited to a State Party under this Treaty undertaken by persons or on territory under its jurisdiction or control.

Article 6

Victim assistance and environmental remediation

1. Each State Party shall, with respect to individuals under its jurisdiction who are affected by the use or testing of nuclear weapons, in accordance with applicable international humanitarian and human rights law, adequately provide age- and gender-sensitive assistance, without discrimination, including medical care, rehabilitation and psychological support, as well as provide for their social and economic inclusion.

2. Each State Party, with respect to areas under its jurisdiction or control contaminated as a result of activities related to the testing or use of nuclear weapons or other nuclear explosive devices, shall take necessary and appropriate measures towards the environmental remediation of areas so contaminated.

3. The obligations under paragraphs 1 and 2 above shall be without prejudice to the duties and obligations of any other States under international law or bilateral agreements.

Article 7

International cooperation and assistance

1. Each State Party shall cooperate with other States Parties to facilitate the implementation of this Treaty.
2. In fulfilling its obligations under this Treaty, each State Party shall have the right to seek and receive assistance, where feasible, from other States Parties.
3. Each State Party in a position to do so shall provide technical, material and financial assistance to States Parties affected by nuclear-weapons use or testing, to further the implementation of this Treaty.
4. Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the victims of the use or testing of nuclear weapons or other nuclear explosive devices.
5. Assistance under this Article may be provided, inter alia, through the United Nations system, international, regional or national organizations or institutions, non-governmental organizations or institutions, the International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, or national Red Cross and Red Crescent Societies, or on a bilateral basis.
6. Without prejudice to any other duty or obligation that it may have under international law, a State Party that has used or tested nuclear weapons or any other nuclear explosive devices shall have a responsibility to provide adequate assistance to affected States Parties, for the purpose of victim assistance and environmental remediation.

Article 8

Meeting of States Parties

1. The States Parties shall meet regularly in order to consider and, where necessary, take decisions in respect of any matter with regard to the application or implementation of this Treaty, in accordance with its relevant provisions, and on further measures for nuclear disarmament, including:
 - (a) The implementation and status of this Treaty;
 - (b) Measures for the verified, time-bound and irreversible elimination of nuclear-weapon programmes, including additional protocols to this Treaty;
 - (c) Any other matters pursuant to and consistent with the provisions of this Treaty.
2. The first meeting of States Parties shall be convened by the Secretary-General of the United Nations within one year of the entry into force of this Treaty. Further meetings of States Parties shall be convened by the Secretary-General of the United Nations on a biennial basis, unless otherwise agreed by the States Parties. The meeting of States Parties shall adopt its rules of procedure at its first session.

Pending their adoption, the rules of procedure of the United Nations conference to negotiate a legally binding instrument to prohibit nuclear weapons, leading towards their total elimination, shall apply.

3. Extraordinary meetings of States Parties shall be convened, as may be deemed necessary, by the Secretary-General of the United Nations, at the written request of any State Party provided that this request is supported by at least one third of the States Parties.

4. After a period of five years following the entry into force of this Treaty, the Secretary-General of the United Nations shall convene a conference to review the operation of the Treaty and the progress in achieving the purposes of the Treaty. The Secretary-General of the United Nations shall convene further review conferences at intervals of six years with the same objective, unless otherwise agreed by the States Parties.

5. States not party to this Treaty, as well as the relevant entities of the United Nations system, other relevant international organizations or institutions, regional organizations, the International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and relevant non-governmental organizations, shall be invited to attend the meetings of States Parties and the review conferences as observers.

Article 9

Costs

1. The costs of the meetings of States Parties, the review conferences and the extraordinary meetings of States Parties shall be borne by the States Parties and States not party to this Treaty participating therein as observers, in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted appropriately.

2. The costs incurred by the Secretary-General of the United Nations in the circulation of declarations under Article 2, reports under Article 4 and proposed amendments under Article 10 of this Treaty shall be borne by the States Parties in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted appropriately.

3. The cost related to the implementation of verification measures required under Article 4 as well as the costs related to the destruction of nuclear weapons or other nuclear explosive devices, and the elimination of nuclear-weapon programmes, including the elimination or conversion of all nuclear-weapons-related facilities, should be borne by the States Parties to which they apply.

Article 10

Amendments

1. At any time after the entry into force of this Treaty, any State Party may propose amendments to the Treaty. The text of a proposed amendment shall be

communicated to the Secretary-General of the United Nations, who shall circulate it to all States Parties and shall seek their views on whether to consider the proposal. If a majority of the States Parties notify the Secretary-General of the United Nations no later than 90 days after its circulation that they support further consideration of the proposal, the proposal shall be considered at the next meeting of States Parties or review conference, whichever comes first.

2. A meeting of States Parties or a review conference may agree upon amendments which shall be adopted by a positive vote of a majority of two thirds of the States Parties. The Depositary shall communicate any adopted amendment to all States Parties.

3. The amendment shall enter into force for each State Party that deposits its instrument of ratification or acceptance of the amendment 90 days following the deposit of such instruments of ratification or acceptance by a majority of the States Parties at the time of adoption. Thereafter, it shall enter into force for any other State Party 90 days following the deposit of its instrument of ratification or acceptance of the amendment.

Article 11

Settlement of disputes

1. When a dispute arises between two or more States Parties relating to the interpretation or application of this Treaty, the parties concerned shall consult together with a view to the settlement of the dispute by negotiation or by other peaceful means of the parties' choice in accordance with Article 33 of the Charter of the United Nations.

2. The meeting of States Parties may contribute to the settlement of the dispute, including by offering its good offices, calling upon the States Parties concerned to start the settlement procedure of their choice and recommending a time limit for any agreed procedure, in accordance with the relevant provisions of this Treaty and the Charter of the United Nations.

Article 12

Universality

Each State Party shall encourage States not party to this Treaty to sign, ratify, accept, approve or accede to the Treaty, with the goal of universal adherence of all States to the Treaty.

Article 13

Signature

This Treaty shall be open for signature to all States at United Nations Headquarters in New York as from 20 September 2017.

Article 14
Ratification, acceptance, approval or accession

This Treaty shall be subject to ratification, acceptance or approval by signatory States. The Treaty shall be open for accession.

Article 15
Entry into force

1. This Treaty shall enter into force 90 days after the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession has been deposited.
2. For any State that deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the date of the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Treaty shall enter into force 90 days after the date on which that State has deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 16
Reservations

The Articles of this Treaty shall not be subject to reservations.

Article 17
Duration and withdrawal

1. This Treaty shall be of unlimited duration.
2. Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Treaty if it decides that extraordinary events related to the subject matter of the Treaty have jeopardized the supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to the Depositary. Such notice shall include a statement of the extraordinary events that it regards as having jeopardized its supreme interests.
3. Such withdrawal shall only take effect 12 months after the date of the receipt of the notification of withdrawal by the Depositary. If, however, on the expiry of that 12-month period, the withdrawing State Party is a party to an armed conflict, the State Party shall continue to be bound by the obligations of this Treaty and of any additional protocols until it is no longer party to an armed conflict.

Article 18
Relationship with other agreements

The implementation of this Treaty shall not prejudice obligations undertaken by States Parties with regard to existing international agreements, to which they are party, where those obligations are consistent with the Treaty.

Article 19
Depositary

The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the Depositary of this Treaty.

Article 20
Authentic texts

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Treaty shall be equally authentic.

DONE at New York, this seventh day of July, two thousand and seventeen.

TRAITÉ SUR L'INTERDICTION DES ARMES NUCLÉAIRES



NATIONS UNIES
2017

TRAITÉ SUR L'INTERDICTION DES ARMES NUCLÉAIRES

Les États Parties au présent Traité,

Résolus à contribuer à la réalisation des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Profondément préoccupés par les conséquences catastrophiques sur le plan humanitaire qu'aurait tout recours aux armes nucléaires, et estimant par conséquent nécessaire d'éliminer complètement ce type d'arme, seul moyen de garantir que les armes nucléaires ne soient plus jamais utilisées, quelles que soient les circonstances,

Conscients des risques que fait peser la persistance des armes nucléaires, notamment du risque d'explosion d'armes nucléaires résultant d'un accident, d'une erreur d'appréciation ou d'un acte intentionnel, et soulignant que ces risques concernent la sécurité de l'humanité tout entière et que tous les États ont la responsabilité commune de prévenir toute utilisation d'armes nucléaires,

Gardant à l'esprit que les effets catastrophiques des armes nucléaires ne peuvent être contrés de manière satisfaisante, transcendent les frontières nationales, ont des répercussions profondes sur la survie de l'humanité, l'environnement, le développement socioéconomique, l'économie mondiale, la sécurité alimentaire et la santé des générations actuelles et futures et touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles, notamment en raison des effets des rayonnements ionisants,

Prenant note des impératifs éthiques pour le désarmement nucléaire et de la nécessité pressante d'instaurer un monde exempt à jamais d'armes nucléaires, qui serait un bien public mondial des plus précieux, servant les intérêts de la sécurité nationale et collective,

Conscients des souffrances et des dommages inacceptables subis par les victimes de l'emploi d'armes nucléaires (hibakushas) et par les personnes touchées par les essais d'armes nucléaires,

Constatant les effets disproportionnés des activités relatives aux armes nucléaires sur les peuples autochtones,

Réaffirmant que tous les États doivent se conformer en tout temps au droit international applicable, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme,

Se fondant sur les principes et les règles du droit international humanitaire, en particulier le principe selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité, le principe de distinction, l'interdiction des attaques menées sans discrimination, les règles relatives à la proportionnalité et aux précautions dans l'attaque, l'interdiction de l'emploi

d'armes de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles et les règles relatives à la protection du milieu naturel,

Considérant que tout emploi d'armes nucléaires serait contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés, tout particulièrement aux principes et règles du droit international humanitaire,

Réaffirmant que tout emploi d'armes nucléaires serait également inacceptable au regard des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique,

Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies, les États doivent s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, et qu'il faut favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde,

Rappelant également la première résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 24 janvier 1946, et les résolutions ultérieures qui appellent à l'élimination des armes nucléaires,

Préoccupés par la lenteur du désarmement nucléaire, par l'importance que continuent de prendre les armes nucléaires dans les concepts, doctrines et politiques militaires et de sécurité et par le gaspillage de ressources économiques et humaines dans des programmes de production, d'entretien et de modernisation d'armes nucléaires,

Estimant qu'une interdiction des armes nucléaires juridiquement contraignante constitue une contribution importante en vue d'instaurer un monde exempt à jamais d'armes nucléaires, dans lequel ces armes auraient été éliminées de manière irréversible, vérifiable et transparente, et résolu à agir dans ce sens,

Résolu à agir pour que de réels progrès soient accomplis sur la voie d'un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

Réaffirmant qu'il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace,

Réaffirmant également que la mise en œuvre intégrale et effective du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, pierre angulaire du régime de non-prolifération et de désarmement nucléaires, est indispensable pour favoriser la paix et la sécurité internationales,

Considérant que le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et son régime de vérification constituent un élément vital du régime de désarmement et de non-prolifération nucléaires,

Se déclarant de nouveau convaincus que la création de zones exemptes d'armes nucléaires internationalement reconnues, fondées sur des accords librement conclus entre les États de la région concernée, consolide la paix et la sécurité aux niveaux mondial et régional, renforce le régime de non-prolifération nucléaire et contribue à la réalisation de l'objectif du désarmement nucléaire,

Soulignant qu'aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de tous les États Parties de développer la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination,

Conscients que la participation pleine et effective des femmes et des hommes, sur un pied d'égalité, est un facteur déterminant pour la promotion et l'instauration d'une paix et d'une sécurité durables, et déterminés à appuyer et à renforcer la participation effective des femmes au désarmement nucléaire,

Constatant l'importance de l'éducation en matière de paix et de désarmement sous tous leurs aspects et de la sensibilisation aux risques et aux effets des armes nucléaires pour les générations actuelles et futures, et déterminés à diffuser les normes et principes inscrits dans le présent Traité,

Soulignant le rôle de la conscience publique dans l'avancement des principes de l'humanité, comme en atteste l'appel à l'élimination complète des armes nucléaires, et saluant les efforts déployés à cette fin par l'Organisation des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d'autres organisations internationales ou régionales, des organisations non gouvernementales, des dignitaires religieux, des parlementaires, des universitaires et les hibakushas,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier **Interdictions**

1. Chaque État Partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance :

a) Mettre au point, mettre à l'essai, produire, fabriquer, acquérir de quelque autre manière, posséder ou stocker des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires;

b) Transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs;

c) Accepter, ni directement ni indirectement, le transfert d'armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs;

d) Employer ni menacer d'employer des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires;

e) Aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à se livrer à une activité interdite à un État Partie par le présent Traité;

f) Demander ou recevoir de l'aide de quiconque, de quelque manière que ce soit, pour se livrer à une activité interdite à un État Partie par le présent Traité;

g) Autoriser l'implantation, l'installation ou le déploiement d'armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires sur son territoire ou en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle.

Article 2

Déclarations

1. Chaque État Partie communique au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du présent Traité à son égard, une déclaration dans laquelle il indique :

a) S'il a été propriétaire ou détenteur d'armes nucléaires ou de dispositifs explosifs nucléaires ou s'il en a contrôlés, et s'il a abandonné son programme d'armement nucléaire, y compris en éliminant ou en reconvertissant irréversiblement toutes les installations liées aux armes nucléaires, avant l'entrée en vigueur du présent Traité à son égard;

b) S'il est propriétaire ou détenteur d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires ou s'il en contrôle, nonobstant l'article 1, alinéa a);

c) Si, sur son territoire ou en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, se trouvent des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires dont un autre État est propriétaire ou détenteur ou qu'il contrôle, nonobstant l'article 1, alinéa g).

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet toutes les déclarations reçues aux États Parties.

Article 3

Garanties

1. Chaque État Partie auquel les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 ne s'appliquent pas maintient au minimum en vigueur les obligations qui lui incombent au titre des garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique au moment de l'entrée en vigueur du présent Traité, sans préjudice de tout instrument pertinent supplémentaire qu'il pourrait adopter à l'avenir.

2. Chaque État Partie auquel les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 ne s'appliquent pas et qui ne l'a pas encore fait, conclut un accord de garanties généralisées avec l'Agence internationale de l'énergie atomique [INFCIRC/153 (corrigé)] et le met en vigueur. Les négociations sur cet accord commencent dans un délai de 180 jours après l'entrée en vigueur du présent Traité à l'égard de l'État Partie concerné. L'accord entre en vigueur au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur du présent Traité à l'égard dudit État Partie. Par la suite, chaque État Partie maintiendra en vigueur les obligations qui en découlent, sans préjudice de tout instrument pertinent supplémentaire qu'il pourrait adopter à l'avenir.

Article 4 **Vers l'élimination complète des armes nucléaires**

1. Chaque État Partie qui, après le 7 juillet 2017, a été propriétaire d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires ou qui en a possédé ou contrôlé et qui a abandonné son programme d'armement nucléaire, y compris en éliminant ou en reconvertissant irréversiblement toutes les installations liées aux armes nucléaires, avant l'entrée en vigueur du présent Traité à son égard, coopère avec l'autorité internationale compétente désignée en application du paragraphe 6 du présent article afin de vérifier l'abandon irréversible de son programme d'armement nucléaire. L'autorité internationale compétente rend compte aux États Parties. L'État Partie concerné conclut avec l'Agence internationale de l'énergie atomique un accord de garanties suffisant pour donner l'assurance crédible que des matières nucléaires déclarées ne seront pas détournées d'activités nucléaires pacifiques et qu'il n'y aura pas d'activités ou de matières nucléaires non déclarées sur tout le territoire de cet État Partie. Les négociations relatives à cet accord commenceront dans un délai de 180 jours après l'entrée en vigueur du présent Traité à l'égard dudit État Partie. L'accord entrera en vigueur au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur du présent Traité à l'égard dudit État Partie. Par la suite, ledit État Partie respectera au minimum les obligations relatives à ces garanties, sans préjudice de tout instrument pertinent supplémentaire qu'il pourrait adopter à l'avenir.

2. Nonobstant l'article premier, alinéa a), chaque État Partie qui est propriétaire d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires ou qui en possède ou en contrôle les retire sans délai du service opérationnel et les détruit dans les meilleurs délais, mais au plus tard à la date fixée à la première réunion des États Parties, conformément à un plan juridiquement contraignant et assorti d'échéances précises en vue de l'abandon vérifié et irréversible de son programme d'armement nucléaire, qui comprend l'élimination ou la reconversion irréversible de toutes les installations liées aux armes nucléaires. Au plus tard 60 jours après l'entrée en vigueur du présent Traité à son égard, l'État Partie présente ce plan aux États Parties ou à une autorité internationale compétente désignée par les États Parties. Ce plan est alors négocié avec l'autorité internationale compétente, qui le soumet à

la réunion suivante des États Parties ou à la conférence d'examen suivante, si cette dernière a lieu avant la réunion, pour approbation conformément à son règlement intérieur.

3. Un État Partie visé par le paragraphe 2 conclut avec l'Agence internationale de l'énergie atomique un accord de garanties suffisant pour donner l'assurance crédible que des matières nucléaires déclarées ne seront pas détournées d'activités nucléaires pacifiques et qu'il n'y aura pas d'activités ou de matières nucléaires non déclarées sur tout le territoire de l'État concerné. Les négociations relatives à cet accord commenceront au plus tard le jour où la mise en œuvre du plan visé au paragraphe 2 sera achevée. L'accord entrera en vigueur au plus tard 18 mois après la date d'engagement des négociations. Par la suite, l'État Partie concerné respectera au minimum les obligations relatives à ces garanties, sans préjudice de tout instrument pertinent supplémentaire qu'il pourrait adopter à l'avenir. Après l'entrée en vigueur de l'accord mentionné dans le présent paragraphe, ledit État Partie communiquera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une déclaration finale indiquant qu'il s'est acquitté de ses obligations au titre du présent article.

4. Nonobstant l'article premier, alinéas b) et g), chaque État Partie qui dispose d'une arme nucléaire ou autre dispositif explosif nucléaire sur son territoire ou en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle dont un autre État est propriétaire ou détenteur ou qu'il contrôle veille au retrait rapide de ces armes dans les meilleurs délais, mais au plus tard à la date fixée à la première réunion des États Parties. Une fois le retrait de ces armes ou de ces autres dispositifs explosifs effectué, ledit État Partie communique au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une déclaration indiquant qu'il s'est acquitté de ses obligations au titre du présent article.

5. Chaque État Partie visé par le présent article présente à chaque réunion des États Parties et à chaque conférence d'examen un rapport sur les progrès accomplis pour s'acquitter de ses obligations au titre du présent article jusqu'à ce qu'elles soient remplies.

6. Les États Parties désignent une ou des autorités internationales compétentes pour négocier et vérifier l'abandon irréversible des programmes d'armement nucléaire, y compris l'élimination ou la reconversion irréversible de toutes les installations liées aux armes nucléaires, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Si cette désignation n'a pas eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent Traité à l'égard d'un État Partie visé au paragraphe 1 ou 2 du présent article, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque une réunion extraordinaire des États Parties pour prendre toute décision qui pourrait être nécessaire.

Article 5

Mesures d'application nationale

1. Chaque État Partie prend les mesures requises pour s'acquitter de ses obligations au titre du présent Traité.
2. Chaque État Partie prend toutes les mesures d'ordre législatif, réglementaire et autre qui sont nécessaires, y compris l'imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État Partie par le présent Traité qui serait menée par des personnes ou sur un territoire se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle.

Article 6

Assistance aux victimes et remise en état de l'environnement

1. Chaque État Partie fournit de manière suffisante aux personnes relevant de sa juridiction qui sont touchées par l'utilisation ou la mise à l'essai d'armes nucléaires, conformément au droit international humanitaire et au droit international des droits de l'homme applicables, une assistance prenant en considération l'âge et le sexe, sans discrimination, y compris des soins médicaux, une réadaptation et un soutien psychologique, ainsi qu'une insertion sociale et économique.
2. Chaque État Partie, s'agissant des zones sous sa juridiction ou son contrôle contaminées par suite d'activités liées à la mise à l'essai ou à l'utilisation d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires, prend les mesures nécessaires et appropriées en vue de la remise en état de l'environnement des zones ainsi contaminées.
3. Les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des devoirs et obligations qui incombent à tout autre État au titre du droit international ou d'accords bilatéraux.

Article 7

Coopération et assistance internationales

1. Chaque État Partie coopère avec les autres États Parties pour faciliter la mise en œuvre du présent Traité.
2. En remplissant ses obligations au titre du présent Traité, chaque État Partie a le droit de solliciter et de recevoir une assistance d'autres États Parties dans la mesure du possible.
3. Chaque État Partie qui est en mesure de le faire fournit une assistance technique, matérielle et financière aux États Parties touchés par l'utilisation ou la mise à l'essai d'armes nucléaires afin de contribuer à la mise en œuvre du présent Traité.

4. Chaque État Partie qui est en mesure de le faire fournit une assistance aux victimes de l'utilisation ou de la mise à l'essai d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires.

5. L'assistance visée par le présent article peut notamment être fournie par l'intermédiaire des organismes des Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, d'organisations ou institutions non gouvernementales, du Comité international de la Croix-Rouge, de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou dans un cadre bilatéral.

6. Sans préjudice de tout autre devoir ou obligation que pourrait lui imposer le droit international, il incombe à l'État Partie qui a utilisé ou mis à l'essai des armes nucléaires ou tout autre dispositif explosif nucléaire de fournir une assistance suffisante aux États Parties touchés aux fins d'assistance aux victimes et de remise en état de l'environnement.

Article 8

Réunion des États Parties

1. Les États Parties se réunissent régulièrement pour examiner toute question concernant l'application ou la mise en œuvre du présent Traité, conformément à ses dispositions pertinentes, et de nouvelles mesures de désarmement nucléaire, et, s'il y a lieu, pour prendre une décision à cet égard, notamment :

- a) La mise en œuvre et l'état du présent Traité;
- b) Des mesures visant à vérifier dans des délais précis l'abandon irréversible des programmes d'armement nucléaire, y compris les protocoles additionnels au présent Traité;
- c) Toutes autres questions, conformément aux dispositions du présent Traité.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera la première réunion des États Parties dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent Traité. Les réunions ultérieures seront convoquées tous les deux ans par le Secrétaire général, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les États Parties. La Réunion des États Parties adoptera son règlement intérieur à sa première session. Tant que ce texte n'aura pas été adopté, le Règlement intérieur de la Conférence des Nations Unies pour la négociation d'un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur élimination complète s'appliquera.

3. Le Secrétaire général convoquera, s'il le juge nécessaire, des réunions extraordinaires à la demande écrite de tout État Partie, pour autant que celle-ci soit soutenue par au moins un tiers des États Parties.

4. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera une conférence chargée d'examiner le fonctionnement du Traité et les progrès accomplis dans la réalisation des buts du présent Traité. Par la suite, tous les six ans, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera des conférences d'examen ayant le même objet, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les États Parties.

5. Les États non parties au présent Traité, de même que les entités compétentes du système des Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales compétentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales concernées, seront invités à assister aux réunions des États Parties et aux conférences d'examen en qualité d'observateurs.

Article 9

Coûts

1. Les coûts des réunions des États Parties, des conférences d'examen et des réunions extraordinaires des États Parties seront pris en charge par les États Parties et les États non parties au présent Traité participant à ces réunions ou conférences en qualité d'observateurs, selon le barème dûment ajusté des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies.

2. Les coûts supportés par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour diffuser les déclarations visées à l'article 2 du présent Traité, les rapports visés à l'article 4 et les propositions d'amendement visées à l'article 10 seront pris en charge par les États Parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies.

3. Les coûts associés à la mise en œuvre des mesures de vérification prévus par l'article 4, de même que les coûts associés à la destruction d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires et à l'abandon des programmes d'armement nucléaire, y compris l'élimination ou la reconversion de toutes les installations liées aux armes nucléaires, devraient être pris en charge par les États Parties auxquels ils sont imputables.

Article 10

Amendements

1. Un État Partie peut proposer des amendements au présent Traité à tout moment après son entrée en vigueur. Le texte de toute proposition d'amendement sera communiqué au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le diffusera à l'ensemble des États Parties et recueillera leur avis quant à l'opportunité d'examiner la proposition. Si une majorité des États Parties notifie au Secrétaire

général, au plus tard 90 jours après la diffusion de la proposition, qu'ils sont favorables à un examen plus approfondi, la proposition sera examinée à la réunion suivante des États Parties ou à la conférence d'examen suivante si cette dernière a lieu avant la réunion.

2. Les réunions des États Parties et les conférences d'examen peuvent convenir d'amendements qui sont adoptés par un vote positif à la majorité des deux tiers des États Parties. Le Dépositaire communique à l'ensemble des États Parties tout amendement ainsi adopté.

3. L'amendement entre en vigueur à l'égard de tout État Partie qui dépose son instrument de ratification ou d'acceptation dudit amendement 90 jours après le dépôt de tels instruments de ratification ou d'acceptation par la majorité des États Parties au moment de l'adoption. Par la suite, l'amendement entre en vigueur à l'égard de tout autre État Partie 90 jours après le dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation de l'amendement.

Article 11

Règlement des différends

1. En cas de différend entre deux ou plusieurs États Parties portant sur l'interprétation ou l'application du présent Traité, les Parties concernées se consulteront en vue d'un règlement du différend par voie de négociation ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix, conformément à l'Article 33 de la Charte des Nations Unies.

2. La Réunion des États Parties peut contribuer au règlement du différend, notamment en offrant ses bons offices, en invitant les États Parties au différend à entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la procédure convenue, conformément aux dispositions pertinentes du présent Traité et à la Charte des Nations Unies.

Article 12

Universalité

Chaque État Partie encourage les États non parties au présent Traité à le signer, à le ratifier, à l'accepter, à l'approuver ou à y adhérer, dans le but de susciter la participation de tous les États au présent Traité.

Article 13

Signature

Le présent Traité sera ouvert à la signature de tous les États au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York à compter du 20 septembre 2017.

Article 14
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

Le présent Traité est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États signataires. Il est ouvert à l'adhésion.

Article 15
Entrée en vigueur

1. Le présent Traité entre en vigueur 90 jours après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour tout État qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la date de dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le présent Traité entre en vigueur 90 jours après la date à laquelle cet État aura déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 16
Réserves

Les articles du présent Traité ne peuvent faire l'objet de réserves.

Article 17
Durée et retrait

1. Le présent Traité a une durée illimitée.
2. Chaque État Partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de se retirer du présent Traité s'il décide que des événements extraordinaires, en rapport avec l'objet du présent Traité, ont compromis les intérêts suprêmes de son pays. Il doit alors notifier ce retrait au Dépositaire. Ladite notification doit contenir un exposé des événements extraordinaires dont l'État en question considère qu'ils ont compromis ses intérêts suprêmes.
3. Le retrait ne prend effet que 12 mois après réception de la notification du retrait par le Dépositaire. Si toutefois, à l'expiration de cette période de 12 mois, l'État Partie qui se retire est partie à un conflit armé, il reste lié par les obligations résultant du présent Traité et de tout protocole additionnel jusqu'à ce qu'il ne soit plus partie à aucun conflit armé.

Article 18
Relations avec d'autres accords

La mise en œuvre du présent Traité est sans préjudice des obligations souscrites par les États Parties au titre d'accords internationaux actuels auxquels ils sont Parties, pour autant que ces obligations soient compatibles avec le présent Traité.

Article 19
Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné par les présentes comme le Dépositaire du présent Traité.

Article 20
Textes faisant foi

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Traité font également foi.

FAIT à New York, le sept juillet deux mille dix-sept.

ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ



Организация Объединенных Наций
2017 год

ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Государства — участники настоящего Договора,

будучи преисполнены решимости внести вклад в реализацию целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций,

выражая глубокую озабоченность по поводу катастрофических гуманитарных последствий, которыми чревато любое применение ядерного оружия, и признавая вытекающую из этого необходимость полной ликвидации такого оружия, которая остается единственным способом гарантировать, что ядерное оружие никогда больше не будет применено ни при каких обстоятельствах,

сознавая риски, порождаемые дальнейшим существованием ядерного оружия, в том числе любым взрывом ядерного боеприпаса в результате случайности, просчета или намеренного применения, и подчеркивая, что эти риски затрагивают безопасность всего человечества и что все государства несут ответственность за предотвращение любого применения ядерного оружия,

сознавая, что катастрофические последствия применения ядерного оружия не могут быть адекватно учтены, выходят за пределы национальных границ, создают серьезную угрозу выживанию человечества, окружающей среде, социально-экономическому развитию, глобальной экономике, продовольственной безопасности и здоровью нынешнего и будущих поколений и в непропорционально сильной степени затрагивают женщин и девочек, в том числе в результате ионизирующего излучения,

признавая нравственные императивы в отношении ядерного разоружения и насущную потребность построения и сохранения мира, свободного от ядерного оружия, что представляет собой глобальное общественное благо наивысшего порядка и отвечает национальным и коллективным интересам безопасности,

памятуя о неприемлемых страданиях и вреде, причиненных жертвам применения ядерного оружия («хибакуси»), а также тем, кто был затронут испытаниями ядерного оружия,

признавая непропорционально сильное воздействие деятельности, связанной с ядерным оружием, на коренные народы,

подтверждая необходимость того, чтобы все государства всегда соблюдали применимые нормы международного права, включая международное гуманитарное право и международное право прав человека,

основываясь на принципах и нормах международного гуманитарного права, в частности на том принципе, что право сторон, находящихся в

вооруженном конфликте, выбирать методы и средства ведения войны не является неограниченным, правиле проведения различия, запрещении нападений неизбирательного характера, правилах соразмерности и предосторожности при нападении, запрещении применения оружия, способного причинить излишние повреждения или излишние страдания, и правилах, касающихся защиты окружающей среды,

считая, что любое применение ядерного оружия противоречило бы нормам международного права, применимым в период вооруженного конфликта, и в частности принципам и нормам международного гуманитарного права,

подтверждая, что любое применение ядерного оружия было бы несовместимо также с принципами гуманности и требованиями общественного сознания,

напоминая, что в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций государства должны воздерживаться в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций, и что следует содействовать установлению и поддержанию международного мира и безопасности с наименьшим отвлечением мировых людских и экономических ресурсов для дела вооружения,

ссылаясь на первую резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятую 24 января 1946 года, и последующие резолюции, в которых содержится призыв к ликвидации ядерного оружия,

будучи обеспокоены медленными темпами ядерного разоружения, сохраняющейся опорой на ядерное оружие в концепциях, доктринах и стратегиях военного строительства и обеспечения безопасности и растрачиванием экономических и людских ресурсов на программы производства, сохранения и модернизации ядерного оружия,

признавая, что юридически обязывающее запрещение ядерного оружия представляет собой важный вклад в дело построения и сохранения мира, свободного от ядерного оружия, в том числе необратимой, проверяемой и транспарентной ликвидации ядерного оружия, и будучи преисполнены решимости принять меры с этой целью,

будучи преисполнены решимости принять меры в целях достижения реального прогресса на пути к всеобщему и полному разоружению под строгим и эффективным международным контролем,

подтверждая, что существует обязательство вести в духе доброй воли и завершить переговоры, ведущие к ядерному разоружению во всех его аспектах под строгим и эффективным международным контролем,

подтверждая также, что полное и эффективное осуществление Договора о нераспространении ядерного оружия, который является краеугольным камнем режима ядерного разоружения и нераспространения, имеет жизненно важное значение для укрепления международного мира и безопасности,

признавая жизненную важность Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и предусмотренного им режима контроля как одного из ключевых элементов режима ядерного разоружения и нераспространения,

подтверждая убежденность в том, что создание международно признанных зон, свободных от ядерного оружия, на основе договоренностей, добровольно заключенных между государствами соответствующего региона, содействует укреплению мира и безопасности на глобальном и региональном уровнях и упрочению режима ядерного нераспространения и способствует достижению цели ядерного разоружения,

особо отмечая, что никакое положение настоящего Договора не следует толковать как затрагивающее неотъемлемое право его государств-участников развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях без дискриминации,

признавая, что равное, полное и эффективное участие как женщин, так и мужчин является одним из существенно важных факторов поощрения и обеспечения устойчивого мира и безопасности, и будучи привержены поддержанию и укреплению эффективного участия женщин в ядерном разоружении,

признавая важность образования по вопросам мира и разоружения во всех его аспектах и повышения осведомленности о рисках и последствиях применения ядерного оружия для нынешнего и будущих поколений и будучи привержены распространению принципов и норм настоящего Договора,

подчеркивая роль общественного сознания в упрочении принципов гуманности, показателем которой стал призыв к полной ликвидации ядерного оружия, и отмечая усилия, предпринимаемые с этой целью Организацией Объединенных Наций, Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца, другими международными и региональными организациями, неправительственными организациями, религиозными лидерами, парламентариями, учеными и хибакуси,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Запреты

1. Каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах:

а) не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать иным образом, не иметь во владении и не накапливать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства;

б) не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно;

с) не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно;

д) не применять ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства и не угрожать их применением;

е) не помогать, не поощрять и не побуждать никоим образом кого бы то ни было к осуществлению любой деятельности, запрещенной для государства-участника по настоящему Договору;

ф) не добиваться и не принимать никоим образом какой-либо помощи от кого бы то ни было в осуществлении любой деятельности, запрещенной для государства-участника по настоящему Договору;

г) не допускать любое размещение, установку или развертывание любого ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств на своей территории или в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем.

Статья 2

Заявления

1. Каждое государство-участник не позднее чем через 30 дней после вступления настоящего Договора в силу для этого государства-участника представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций заявление, в котором оно:

а) объявляет, имело ли оно в собственности, во владении или под контролем ядерное оружие или ядерные взрывные устройства и ликвидировало ли оно свою программу ядерного оружия, включая ликвидацию или необратимую конверсию всех объектов, связанных с ядерным оружием, до вступления настоящего Договора в силу для этого государства-участника;

б) объявляет, невзирая на пункт (а) статьи 1, имеет ли оно в собственности, во владении или под контролем любое ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства;

с) объявляет, невзирая на пункт (г) статьи 1, имеет ли оно на своей территории или в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем, любое ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, которые находятся в собственности, во владении или под контролем другого государства.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает все такие полученные заявления государствам-участникам.

Статья 3 Гарантии

1. Каждое государство-участник, к которому не применяются пункты 1 или 2 статьи 4, как минимум сохраняет свои обязательства в отношении гарантий Международного агентства по атомной энергии, действующие на момент вступления в силу настоящего Договора, без ущерба для любых соответствующих дополнительных документов, которые оно может принять в будущем.

2. Каждое государство-участник, к которому не применяются пункты 1 или 2 статьи 4, заключает с Международным агентством по атомной энергии соглашение о всеобъемлющих гарантиях (INFCIRC/153 с исправлениями), если оно еще не сделало это, и вводит его в действие. Переговоры по такому соглашению начинаются в течение 180 дней после вступления настоящего Договора в силу для этого государства-участника. Соглашение вступает в силу не позднее чем через 18 месяцев после вступления настоящего Договора в силу для этого государства-участника. В дальнейшем каждое государство-участник сохраняет такие обязательства без ущерба для любых соответствующих дополнительных документов, которые оно может принять в будущем.

Статья 4 Достижение полной ликвидации ядерного оружия

1. Каждое государство-участник, которое после 7 июля 2017 года имело в собственности, во владении или под контролем ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства и ликвидировало свою программу ядерного оружия, включая ликвидацию или необратимую конверсию всех объектов, связанных с ядерным оружием, до вступления для него в силу настоящего Договора, сотрудничает с компетентным международным органом, назначенным в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, для проверки

необратимой ликвидации его программы ядерного оружия. Компетентный международный орган представляет доклады государствам-участникам. Такое государство-участник заключает с Международным агентством по атомной энергии соглашение о гарантиях, достаточное, чтобы предоставить надежные заверения относительно непереклечения заявленного ядерного материала с мирной ядерной деятельности и отсутствия незаявленных ядерного материала или деятельности в этом государстве-участнике в целом. Переговоры по такому соглашению начинаются в течение 180 дней после вступления настоящего Договора в силу для этого государства-участника. Соглашение вступает в силу не позднее чем через 18 месяцев после вступления настоящего Договора в силу для этого государства-участника. В дальнейшем это государство-участник как минимум сохраняет такие обязательства в отношении гарантий без ущерба для любых соответствующих дополнительных документов, которые оно может принять в будущем.

2. Невзирая на пункт (а) статьи 1, любое государство-участник, которое имеет в собственности, во владении или под контролем ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, незамедлительно выводит их из состояния оперативной готовности и уничтожает их как можно скорее, но не позднее срока, который будет установлен первым совещанием государств-участников, в соответствии с юридически обязывающим, предусматривающим конкретные сроки планом проверяемой и необратимой ликвидации программы ядерного оружия этого государства-участника, включая ликвидацию или необратимую конверсию всех объектов, связанных с ядерным оружием. Государство-участник, не позднее чем через 60 дней после вступления настоящего Договора в силу для этого государства-участника, представляет этот план государствам-участникам или компетентному международному органу, назначенному государствами-участниками. Далее этот план согласовывается с компетентным международным органом, который представляет его последующему совещанию государств-участников или обзорной конференции, в зависимости от того, которое из них проводится первым, для утверждения в соответствии с их правилами процедуры.

3. Государство-участник, к которому применяется пункт 2 выше, заключает с Международным агентством по атомной энергии соглашение о гарантиях, достаточное, чтобы предоставить надежные заверения относительно непереклечения заявленного ядерного материала с мирной ядерной деятельности и отсутствия незаявленных ядерного материала или деятельности в государстве в целом. Переговоры по такому соглашению начинаются не позднее даты завершения осуществления плана, указанного в пункте 2. Соглашение вступает в силу не позднее чем через 18 месяцев после даты начала переговоров. В дальнейшем это государство-участник как минимум сохраняет такие обязательства в отношении гарантий без ущерба для любых соответствующих дополнительных документов, которые оно может принять в будущем. После вступления в силу соглашения, указанного в

настоящем пункте, государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций окончательное заявление о том, что оно выполнило свои обязательства по настоящей статье.

4. Невзирая на пункты (b) и (g) статьи 1, каждое государство-участник, которое имеет на своей территории или в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем, любое ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, которые находятся в собственности, во владении или под контролем другого государства, обеспечивает оперативный вывод такого оружия как можно скорее, но не позднее срока, который будет установлен первым совещанием государств-участников. После вывода такого оружия или других взрывных устройств это государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций заявление о том, что оно выполнило свои обязательства по настоящей статье.

5. Каждое государство-участник, к которому применяется настоящая статья, представляет каждому совещанию государств-участников и каждой обзорной конференции доклады о ходе выполнения его обязательств по настоящей статье до тех пор, пока они не будут выполнены полностью.

6. Государства-участники назначают компетентный международный орган или органы для согласования и проверки необратимой ликвидации программ ядерного оружия, включая ликвидацию или необратимую конверсию всех объектов, связанных с ядерным оружием, в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи. Если такое назначение не состоялось до вступления настоящего Договора в силу для государства-участника, к которому применяются пункты 1 или 2 настоящей статьи, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает внеочередное совещание государств-участников для принятия любых решений, которые могут потребоваться.

Статья 5

Национальное осуществление

1. Каждое государство-участник принимает необходимые меры для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

2. Каждое государство-участник принимает все надлежащие правовые, административные и иные меры, включая применение уголовных санкций, чтобы предотвращать и пресекать осуществление любой деятельности, запрещенной для государства-участника по настоящему Договору, лицами или на территории под его юрисдикцией или контролем.

Статья 6

Помощь жертвам и восстановление окружающей среды

1. Каждое государство-участник в соответствии с применимыми нормами международного гуманитарного права и права прав человека надлежащим образом оказывает лицам под его юрисдикцией, пострадавшим от применения или испытания ядерного оружия, помощь с учетом возрастного и гендерного факторов, без дискриминации, включая медицинскую помощь, реабилитационную и психологическую поддержку, а также обеспечивает социальную и экономическую интеграцию.
2. Каждое государство-участник в отношении находящихся под его юрисдикцией или контролем районов, загрязненных в результате деятельности, связанной с испытанием или применением ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, принимает необходимые и соответствующие меры для восстановления окружающей среды загрязненных таким образом районов.
3. Обязательства по пунктам 1 и 2 выше не затрагивают обязанности и обязательства любых других государств по международному праву или двусторонним соглашениям.

Статья 7

Международное сотрудничество и помощь

1. Каждое государство-участник сотрудничает с другими государствами-участниками в целях содействия осуществлению настоящего Договора.
2. При выполнении своих обязательств по настоящему Договору каждое государство-участник имеет право запрашивать и получать помощь, когда это возможно, от других государств-участников.
3. Каждое государство-участник, которое в состоянии делать это, оказывает техническую, материальную и финансовую помощь государствам-участникам, пострадавшим от применения или испытания ядерного оружия, в целях содействия дальнейшему осуществлению настоящего Договора.
4. Каждое государство-участник, которое в состоянии делать это, оказывает помощь жертвам применения или испытания ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств.
5. Помощь в соответствии с настоящей статьей может предоставляться, в частности, через систему Организации Объединенных Наций, международные, региональные или национальные организации или учреждения, неправительственные организации или учреждения, Международный комитет Красного Креста, Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца или национальные

общества Красного Креста и Красного Полумесяца или на двусторонней основе.

6. Без ущерба для любых других обязанностей или обязательств, которые оно может иметь по международному праву, государство-участник, которое применило или испытало ядерное оружие или любые другие ядерные взрывные устройства, несет ответственность за оказание надлежащей помощи затронутым государствам-участникам в целях оказания помощи жертвам и восстановления окружающей среды.

Статья 8

Совещание государств-участников

1. Государства-участники регулярно собираются для рассмотрения и, где это необходимо, решения любых вопросов, связанных с применением или осуществлением настоящего Договора, согласно его соответствующим положениям, и дальнейших мер по ядерному разоружению, включая:

а) вопросы, касающиеся осуществления и состояния настоящего Договора;

б) вопросы, касающиеся мер для проверяемой и необратимой ликвидации программ ядерного оружия в установленные сроки, включая дополнительные протоколы к настоящему Договору;

с) любые другие вопросы, касающиеся положений настоящего Договора и согласующиеся с ними.

2. Первое совещание государств-участников созывается Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в течение одного года после вступления настоящего Договора в силу. Последующие совещания государств-участников созываются Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций на двухгодичной основе, если государства-участники не примут иного решения. Совещание государств-участников принимает собственные правила процедуры на своей первой сессии. До их принятия применяются правила процедуры Конференции Организации Объединенных Наций для согласования юридически обязывающего документа о запрете ядерного оружия, который привел бы к полной ликвидации этого оружия.

3. Внеочередные совещания государств-участников созываются, когда это может быть сочтено необходимым, Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций по письменной просьбе любого государства-участника при условии, что эту просьбу поддерживает по меньшей мере одна треть государств-участников.

4. По прошествии пяти лет после вступления настоящего Договора в силу Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает

конференцию для рассмотрения действия Договора и прогресса в достижении целей Договора. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает последующие обзорные конференции с интервалом в шесть лет с той же целью, если государства-участники не примут иного решения.

5. Государства, не являющиеся участниками настоящего Договора, а также соответствующие структуры системы Организация Объединенных Наций, другие соответствующие международные организации или учреждения, региональные организации, Международный комитет Красного Креста, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и соответствующие неправительственные организации приглашаются на совещания государств-участников и обзорные конференции в качестве наблюдателей.

Статья 9

Расходы

1. Расходы, связанные с проведением совещаний государств-участников, обзорных конференций и внеочередных совещаний государств-участников, покрываются государствами-участниками и участвующими в них в качестве наблюдателей государствами, которые не являются участниками настоящего Договора, в соответствии со шкалой взносов Организации Объединенных Наций, скорректированной надлежащим образом.

2. Расходы, понесенные Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в связи с распространением заявлений согласно статье 2, докладов согласно статье 4 и предлагаемых поправок согласно статье 10 настоящего Договора, покрываются государствами-участниками в соответствии со шкалой взносов Организации Объединенных Наций, скорректированной надлежащим образом.

3. Расходы, связанные с осуществлением мер по проверке, требуемых согласно статье 4, а также расходы, связанные с уничтожением ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств и ликвидацией программ ядерного оружия, включая ликвидацию или конверсию всех объектов, связанных с ядерным оружием, покрываются соответствующими государствами-участниками.

Статья 10

Поправки

1. В любое время после вступления настоящего Договора в силу любое государство-участник может предложить поправки к Договору. Текст предлагаемой поправки направляется Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который рассылает его всем государствам-участникам и

запрашивает их мнения о том, следует ли рассмотреть это предложение. Если большинство государств-участников не позднее чем через 90 дней после рассылки предложения уведомляют Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о том, что они поддерживают дальнейшее рассмотрение этого предложения, предложение рассматривается на следующем совещании государств-участников или обзорной конференции, в зависимости от того, которое из них проводится первым.

2. Совещание государств-участников или обзорная конференция могут согласовать поправки, которые принимаются большинством в две трети государств-участников. Депозитарий рассылает каждую принятую поправку всем государствам-участникам.

3. Поправка вступает в силу для каждого государства-участника, которое сдает на хранение свой документ о ратификации или принятии поправки, по прошествии 90 дней после сдачи на хранение таких документов о ратификации или принятии государствами-участниками, составляющими большинство на момент принятия. Впоследствии она вступает в силу для любого другого государства-участника по прошествии 90 дней после сдачи им на хранение своего документа о ратификации или принятии поправки.

Статья 11

Урегулирование споров

1. При возникновении спора между двумя или более государствами-участниками в связи с применением или толкованием настоящего Договора соответствующие участники проводят совместные консультации с целью урегулирования спора путем переговоров или другими мирными средствами по выбору участников в соответствии со статьей 33 Устава Организации Объединенных Наций.

2. Совещание государств-участников может способствовать урегулированию спора, в том числе предложив свои добрые услуги, призвав заинтересованные государства-участники начать процедуру урегулирования по их выбору и рекомендовав предельный срок в отношении любой согласованной процедуры согласно соответствующим положениям настоящего Договора и Устава Организации Объединенных Наций.

Статья 12

Универсальность

Каждое государство-участник побуждает государства, не являющиеся участниками настоящего Договора, подписать, ратифицировать, принять, утвердить Договор или присоединиться к нему, преследуя цель обеспечить всеобщее присоединение к Договору всех государств.

Статья 13

Подписание

Настоящий Договор открыт для подписания его всеми государствами в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 20 сентября 2017 года.

Статья 14

Ратификация, принятие, утверждение или присоединение

Настоящий Договор подлежит ратификации, принятию или утверждению подписавшими его государствами. Договор открыт для присоединения.

Статья 15

Вступление в силу

1. Настоящий Договор вступает в силу по прошествии 90 дней после сдачи на хранение пятидесятой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.
2. Для любого государства, которое сдает на хранение свою ратификационную грамоту или документ о принятии, утверждении или присоединении после даты сдачи на хранение пятидесятой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении, настоящий Договор вступает в силу по прошествии 90 дней после даты сдачи на хранение этим государством своей ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.

Статья 16

Оговорки

Оговорки в отношении статей настоящего Договора не допускаются.

Статья 17

Срок действия и выход

1. Настоящий Договор является бессрочным.
2. Каждое государство-участник в порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет право выйти из настоящего Договора, если оно решит, что связанные с содержанием Договора исключительные

обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы его страны. О таком выходе оно уведомляет депозитария. В таком уведомлении должно содержаться заявление об исключительных обстоятельствах, которые оно рассматривает как поставившие под угрозу его высшие интересы.

3. Такой выход вступает в силу только по истечении 12 месяцев после даты получения депозитарием уведомления о выходе. Однако, если по истечении этого двенадцатимесячного периода выходящее государство-участник является стороной вооруженного конфликта, это государство-участник продолжает быть связанным обязательствами по настоящему Договору и любым дополнительным протоколам до тех пор, пока оно не перестает быть стороной вооруженного конфликта.

Статья 18

Связь с другими соглашениями

Осуществление настоящего Договора не наносит ущерба обязательствам государств-участников в отношении существующих международных соглашений, в которых они участвуют, если эти обязательства согласуются с Договором.

Статья 19

Депозитарий

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций настоящим назначается депозитарием настоящего Договора.

Статья 20

Аутентичные тексты

Тексты настоящего Договора на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными.

СОВЕРШЕНО в Нью-Йорке седьмого июля две тысячи семнадцатого года.

TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES



NACIONES UNIDAS
2017

TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES

Los Estados partes en el presente Tratado,

Decididos a contribuir a la realización de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,

Profundamente preocupados por las catastróficas consecuencias humanitarias que tendría cualquier uso de armas nucleares y reconociendo la consiguiente necesidad de eliminar por completo esas armas, que es la única manera de garantizar que las armas nucleares no se vuelvan a utilizar nunca en ninguna circunstancia,

Conscientes de los riesgos que plantea el hecho de que sigan existiendo armas nucleares, incluida cualquier detonación de armas nucleares por accidente, por error de cálculo o deliberada, y poniendo de relieve que esos riesgos afectan a la seguridad de toda la humanidad y que todos los Estados comparten la responsabilidad de prevenir cualquier uso de armas nucleares,

Conocedores de que las catastróficas consecuencias de las armas nucleares no pueden ser atendidas adecuadamente, trascienden las fronteras nacionales, tienen graves repercusiones para la supervivencia humana, el medio ambiente, el desarrollo socioeconómico, la economía mundial, la seguridad alimentaria y la salud de las generaciones actuales y futuras, y tienen un efecto desproporcionado en las mujeres y las niñas, incluso como resultado de la radiación ionizante,

Reconociendo los imperativos éticos para el desarme nuclear y la urgencia de lograr y mantener un mundo libre de armas nucleares, bien público mundial de primer orden que responde a intereses tanto nacionales como de seguridad colectiva,

Conscientes de los sufrimientos y daños inaceptables causados a las víctimas del uso de armas nucleares (hibakusha), así como a las personas afectadas por los ensayos de armas nucleares,

Reconociendo el impacto desproporcionado de las actividades relacionadas con las armas nucleares en los pueblos indígenas,

Reafirmando la necesidad de que todos los Estados cumplan en todo momento el derecho internacional aplicable, incluidos el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos,

Basándose en los principios y normas del derecho internacional humanitario, en particular el principio según el cual el derecho de las partes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de combate no es ilimitado, la norma de la distinción, la prohibición de ataques indiscriminados, las normas relativas a la

proporcionalidad y las precauciones en el ataque, la prohibición del uso de armas que, por su naturaleza, puedan causar daños superfluos o sufrimientos innecesarios, y las normas para la protección del medio ambiente,

Considerando que cualquier uso de armas nucleares sería contrario a las normas del derecho internacional aplicables en los conflictos armados, en particular los principios y las normas del derecho internacional humanitario,

Reafirmando que cualquier uso de armas nucleares sería también aborrecible a la luz de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública,

Recordando que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los Estados deben abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, y que ha de promoverse el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con la menor desviación posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos,

Recordando también la primera resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 24 de enero de 1946, y las resoluciones posteriores en las que se hace un llamamiento a la eliminación de las armas nucleares,

Preocupados por la lentitud del desarme nuclear, la continua dependencia de las armas nucleares en los conceptos, doctrinas y políticas militares y de seguridad, y el despilfarro de recursos económicos y humanos en programas para la producción, el mantenimiento y la modernización de armas nucleares,

Reconociendo que una prohibición jurídicamente vinculante de las armas nucleares constituye una contribución importante para el logro y el mantenimiento de un mundo libre de armas nucleares, incluida la eliminación irreversible, verificable y transparente de las armas nucleares, y decididos a actuar con ese fin,

Decididos a actuar con miras a lograr avances efectivos para alcanzar el desarme general y completo bajo un control internacional estricto y eficaz,

Reafirmando que existe la obligación de celebrar de buena fe y llevar a su conclusión negociaciones conducentes al desarme nuclear en todos sus aspectos bajo un control internacional estricto y eficaz,

Reafirmando también que la aplicación plena y efectiva del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, piedra angular del régimen de desarme y no proliferación nucleares, tiene una función vital en la promoción de la paz y la seguridad internacionales,

Reconociendo la importancia vital del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y su régimen de verificación como elemento básico del régimen de desarme y no proliferación nucleares,

Reafirmando la convicción de que la creación de zonas libres de armas nucleares reconocidas internacionalmente sobre la base de acuerdos suscritos libremente por los Estados de la región afectada promueve la paz y la seguridad mundiales y regionales, fortalece el régimen de no proliferación nuclear y contribuye a la consecución del objetivo del desarme nuclear,

Poniendo de relieve que nada de lo dispuesto en el presente Tratado se interpretará en el sentido de afectar el derecho inalienable de sus Estados partes a desarrollar la investigación, la producción y el uso de la energía nuclear con fines pacíficos sin discriminación,

Reconociendo que la participación plena, efectiva y en condiciones de igualdad de las mujeres y los hombres es un factor esencial para la promoción y el logro de la paz y la seguridad sostenibles, y comprometidos a apoyar y reforzar la participación efectiva de las mujeres en el desarme nuclear,

Reconociendo también la importancia de la educación para la paz y el desarme en todos sus aspectos y de la sensibilización sobre los riesgos y las consecuencias de las armas nucleares para las generaciones actuales y futuras, y comprometidos a difundir los principios y las normas del presente Tratado,

Destacando la importancia de la conciencia pública para promover los principios de humanidad, como pone de manifiesto el llamamiento para la eliminación total de las armas nucleares, y reconociendo los esfuerzos realizados a tal fin por las Naciones Unidas, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, otras organizaciones internacionales y regionales, organizaciones no gubernamentales, líderes religiosos, parlamentarios, académicos y los hibakusha,

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1

Prohibiciones

1. Cada Estado parte se compromete a nunca y bajo ninguna circunstancia:
 - a) Desarrollar, ensayar, producir, fabricar, adquirir de cualquier otro modo, poseer o almacenar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares;
 - b) Transferir a ningún destinatario armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares, o el control sobre dichas armas o dispositivos explosivos, de manera directa o indirecta;
 - c) Recibir la transferencia o el control de armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares de manera directa o indirecta;
 - d) Usar o amenazar con usar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares;

e) Ayudar, alentar o inducir de cualquier manera a nadie a realizar cualquier actividad prohibida a los Estados partes en virtud del presente Tratado;

f) Solicitar o recibir ayuda de cualquier manera de nadie para realizar cualquier actividad prohibida a los Estados partes en virtud del presente Tratado;

g) Permitir el emplazamiento, la instalación o el despliegue de armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares en su territorio o en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control.

Artículo 2

Declaraciones

1. Cada Estado parte presentará al Secretario General de las Naciones Unidas, a más tardar 30 días después de la entrada en vigor del presente Tratado para ese Estado parte, una declaración en la que:

a) Declarará si tenía en propiedad, poseía o controlaba armas nucleares o dispositivos explosivos nucleares y si eliminó su programa de armas nucleares, incluida la eliminación o conversión irreversible de todas las instalaciones relacionadas con armas nucleares, antes de la entrada en vigor del presente Tratado para ese Estado parte;

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 a), declarará si tiene en propiedad, posee o controla armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares;

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 g), declarará si hay armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares en su territorio o en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control que otro Estado tenga en propiedad, posea o controle.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá a los Estados partes todas las declaraciones recibidas.

Artículo 3

Salvaguardias

1. Cada Estado parte al que no se aplique el artículo 4, párrafo 1 o 2, mantendrá, como mínimo, sus obligaciones en materia de salvaguardias con el Organismo Internacional de Energía Atómica vigentes en el momento de la entrada en vigor del presente Tratado, sin perjuicio de cualquier instrumento pertinente adicional que pueda adoptar en el futuro.

2. Cada Estado parte al que no se aplique el artículo 4, párrafo 1 o 2, y que no lo haya hecho aún, celebrará con el Organismo Internacional de Energía Atómica y hará que entre en vigor un Acuerdo de Salvaguardias Amplias (INFCIRC/153

(Corrected)). La negociación sobre ese acuerdo se iniciará dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Tratado para ese Estado parte. El acuerdo entrará en vigor a más tardar 18 meses después de la entrada en vigor del presente Tratado para ese Estado parte. Cada Estado parte mantendrá con posterioridad esas obligaciones, sin perjuicio de cualquier instrumento pertinente adicional que pueda adoptar en el futuro.

Artículo 4

Hacia la eliminación total de las armas nucleares

1. Cada Estado parte que con posterioridad al 7 de julio de 2017 haya tenido en propiedad, poseído o controlado armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares y haya eliminado su programa de armas nucleares, incluida la eliminación o conversión irreversible de todas las instalaciones relacionadas con armas nucleares, antes de la entrada en vigor del presente Tratado para ese Estado parte, cooperará con la autoridad internacional competente designada con arreglo al párrafo 6 del presente artículo a efectos de verificar la eliminación irreversible de su programa de armas nucleares. La autoridad internacional competente informará a los Estados partes al respecto. El Estado parte en cuestión celebrará un acuerdo de salvaguardias con el Organismo Internacional de Energía Atómica que sea suficiente para ofrecer garantías creíbles de que no se producirá ninguna desviación de materiales nucleares declarados de las actividades nucleares pacíficas y que no existen materiales o actividades nucleares no declaradas en ese Estado parte en su conjunto. La negociación sobre ese acuerdo se iniciará dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Tratado para ese Estado parte. El acuerdo entrará en vigor a más tardar 18 meses después de la entrada en vigor del presente Tratado para ese Estado parte. Dicho Estado parte mantendrá posteriormente, como mínimo, esas obligaciones en materia de salvaguardias, sin perjuicio de cualquier instrumento pertinente adicional que pueda adoptar en el futuro.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 a), cada Estado parte que tenga en propiedad, posea o controle armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares los pondrá inmediatamente fuera de estado operativo, y los destruirá lo antes posible pero a más tardar en un plazo que determinará la primera reunión de los Estados partes, de conformidad con un plan jurídicamente vinculante y con plazos concretos para la eliminación verificada e irreversible del programa de armas nucleares de ese Estado parte, incluida la eliminación o conversión irreversible de todas las instalaciones relacionadas con armas nucleares. El Estado parte, a más tardar 60 días después de la entrada en vigor para él del presente Tratado, presentará dicho plan a los Estados partes o a una autoridad internacional competente designada por los Estados partes. Dicho plan se negociará entonces con la autoridad internacional competente, que lo presentará a la siguiente reunión de los Estados

partes o a la siguiente conferencia de examen, la que se celebre primero, para su aprobación de conformidad con sus reglamentos.

3. El Estado parte al que se aplique el párrafo 2 del presente artículo celebrará un acuerdo de salvaguardias con el Organismo Internacional de Energía Atómica que sea suficiente para ofrecer garantías creíbles de que no se producirá ninguna desviación de materiales nucleares declarados de las actividades nucleares pacíficas y que no existen materiales o actividades nucleares no declaradas en el Estado en su conjunto. La negociación sobre ese acuerdo se iniciará a más tardar en la fecha en que concluya la ejecución del plan a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo. El acuerdo entrará en vigor a más tardar 18 meses después de la fecha de inicio de la negociación. Dicho Estado parte mantendrá posteriormente, como mínimo, esas obligaciones en materia de salvaguardias, sin perjuicio de cualquier instrumento pertinente adicional que pueda adoptar en el futuro. Tras la entrada en vigor del acuerdo a que se hace referencia en el presente párrafo, el Estado parte presentará al Secretario General de las Naciones Unidas una declaración final de que ha cumplido sus obligaciones en virtud del presente artículo.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 b) y g), cada Estado parte que tenga armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares en su territorio o en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control que otro Estado tenga en propiedad, posea o controle velará por la rápida remoción de esas armas lo antes posible, pero a más tardar en un plazo que determinará la primera reunión de los Estados partes. Tras la remoción de esas armas u otros dispositivos explosivos, dicho Estado parte presentará al Secretario General de las Naciones Unidas una declaración de que ha cumplido sus obligaciones en virtud del presente artículo.

5. Cada Estado parte al que se aplique el presente artículo presentará un informe a cada reunión de los Estados partes y cada conferencia de examen sobre los avances logrados en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente artículo, hasta que las haya cumplido por completo.

6. Los Estados partes designarán una autoridad o autoridades internacionales competentes para negociar y verificar la eliminación irreversible de los programas de armas nucleares, incluida la eliminación o conversión irreversible de todas las instalaciones relacionadas con armas nucleares, de conformidad con los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo. En caso de que no se haya realizado esa designación antes de la entrada en vigor del presente Tratado para un Estado parte al que se aplique el párrafo 1 o 2 del presente artículo, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará una reunión extraordinaria de los Estados partes para adoptar las decisiones que puedan ser necesarias.

Artículo 5

Aplicación en el plano nacional

1. Cada Estado parte adoptará las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones en virtud del presente Tratado.
2. Cada Estado parte adoptará todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que procedan, incluida la imposición de sanciones penales, para prevenir y reprimir cualquiera actividad prohibida a los Estados partes en virtud del presente Tratado realizada por personas o en territorio bajo su jurisdicción o control.

Artículo 6

Asistencia a las víctimas y restauración del medio ambiente

1. Cada Estado parte deberá, con respecto a las personas bajo su jurisdicción afectadas por el uso o el ensayo de armas nucleares, de conformidad con el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos aplicable, proporcionar adecuadamente asistencia que tenga en cuenta la edad y el género, sin discriminación, incluida atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico, además de proveer los medios para su inclusión social y económica.
2. Cada Estado parte adoptará, con respecto a las zonas bajo su jurisdicción o control contaminadas como consecuencia de actividades relacionadas con el ensayo o el uso de armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares, las medidas necesarias y adecuadas para la restauración del medio ambiente de las zonas contaminadas.
3. Las obligaciones previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo se entenderán sin perjuicio de los deberes y obligaciones que correspondan a otros Estados en virtud del derecho internacional o de acuerdos bilaterales.

Artículo 7

Cooperación y asistencia internacionales

1. Cada Estado parte cooperará con los demás Estados partes para facilitar la aplicación del presente Tratado.
2. Cada Estado parte tendrá derecho a solicitar y recibir asistencia de otros Estados partes, cuando sea viable, para el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Tratado.
3. Cada Estado parte que esté en condiciones de hacerlo prestará asistencia técnica, material y financiera a los Estados partes afectados por el uso o el ensayo de armas nucleares, a fin de impulsar la aplicación del presente Tratado.

4. Cada Estado parte que esté en condiciones de hacerlo prestará asistencia a las víctimas del uso o del ensayo de armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares.

5. La asistencia prevista en el presente artículo se podrá prestar, entre otros medios, a través del sistema de las Naciones Unidas, de organizaciones o instituciones internacionales, regionales o nacionales, de organizaciones o instituciones no gubernamentales, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja o de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, o de manera bilateral.

6. Sin perjuicio de cualquier otro deber u obligación que pueda tener en virtud del derecho internacional, el Estado parte que haya usado o ensayado armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares tendrá la responsabilidad de proporcionar una asistencia adecuada a los Estados partes afectados, con el propósito de asistir a las víctimas y restaurar el medio ambiente.

Artículo 8

Reunión de los Estados partes

1. Los Estados partes se reunirán regularmente para considerar y, cuando sea necesario, tomar decisiones sobre cualquier cuestión relativa a la aplicación o implementación del presente Tratado, de conformidad con sus disposiciones pertinentes, o sobre medidas adicionales para el desarme nuclear, entre ellas:

- a) La aplicación y el estado del presente Tratado;
- b) Medidas para la eliminación verificada, sujeta a plazos concretos e irreversible de los programas de armas nucleares, incluidos protocolos adicionales al presente Tratado;
- c) Cualquier otra cuestión de conformidad y en consonancia con las disposiciones del presente Tratado.

2. La primera reunión de los Estados partes será convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Tratado. Las siguientes reuniones de los Estados partes serán convocadas por el Secretario General de las Naciones Unidas con carácter bienal, a menos que los Estados partes acuerden otra cosa. La reunión de los Estados partes aprobará su reglamento en su primer período de sesiones. Hasta esa aprobación se aplicará el reglamento de la conferencia de las Naciones Unidas para negociar un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares y conduzca a su total eliminación.

3. Cuando se considere necesario, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará reuniones extraordinarias de los Estados partes cuando cualquier Estado

parte lo solicite por escrito y siempre que esa solicitud reciba el apoyo de al menos un tercio de los Estados partes.

4. Transcurrido un período de cinco años desde la entrada en vigor del presente Tratado, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará una conferencia para examinar el funcionamiento del Tratado y los progresos en la consecución de sus propósitos. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará otras conferencias de examen a intervalos de seis años con el mismo objetivo, a menos que los Estados partes acuerden otra cosa.

5. Los Estados que no sean partes en el presente Tratado, así como las entidades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones o instituciones internacionales pertinentes, organizaciones regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes, serán invitados a asistir a las reuniones de los Estados partes y las conferencias de examen en calidad de observadores.

Artículo 9

Costos

1. Los costos de las reuniones de los Estados partes, las conferencias de examen y las reuniones extraordinarias de los Estados partes serán sufragados por los Estados partes y por los Estados que no sean partes en el presente Tratado que participen en ellas en calidad de observadores, de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones Unidas ajustada adecuadamente.

2. Los costos en que incurra el Secretario General de las Naciones Unidas para distribuir las declaraciones previstas en el artículo 2, los informes previstos en el artículo 4 y las propuestas de enmienda previstas en el artículo 10 del presente Tratado serán sufragados por los Estados partes de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones Unidas ajustada adecuadamente.

3. Los costos relacionados con la aplicación de las medidas de verificación exigidas por el artículo 4, así como los relacionados con la destrucción de las armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares y la eliminación de los programas de armas nucleares, incluida la eliminación o conversión de todas las instalaciones relacionadas con armas nucleares, deberían ser sufragados por los Estados partes a los que sean imputables.

Artículo 10

Enmiendas

1. Todo Estado parte podrá, en cualquier momento después de la entrada en vigor del presente Tratado, proponer enmiendas a él. El texto de la propuesta de

enmienda se comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, quien lo distribuirá entre todos los Estados partes y recabará la opinión de estos sobre la conveniencia de examinar la propuesta. Si una mayoría de los Estados partes notifica al Secretario General de las Naciones Unidas, a más tardar 90 días después de la distribución de la propuesta, que está a favor de examinarla, la propuesta se examinará en la siguiente reunión de los Estados partes o en la siguiente conferencia de examen, la que se celebre primero.

2. Una reunión de los Estados partes o una conferencia de examen podrá acordar enmiendas que se aprobarán con el voto favorable de una mayoría de dos tercios de los Estados partes. El depositario comunicará a todos los Estados partes las enmiendas aprobadas.

3. La enmienda entrará en vigor para cada Estado parte que deposite su instrumento de ratificación o aceptación de la enmienda transcurridos 90 días del depósito de los correspondientes instrumentos de ratificación o aceptación por la mayoría de los Estados partes en el momento de la aprobación. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para cualquier otro Estado parte transcurridos 90 días del depósito de su instrumento de ratificación o aceptación de la enmienda.

Artículo 11

Solución de controversias

1. En caso de controversia entre dos o más Estados partes sobre la interpretación o aplicación del presente Tratado, las partes interesadas se consultarán con miras a resolver la controversia mediante negociación o cualquier otro medio pacífico de su elección, de conformidad con el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

2. La reunión de los Estados partes podrá contribuir a la solución de la controversia, en particular mediante el ofrecimiento de sus buenos oficios, el llamamiento a los Estados partes interesados para que pongan en marcha el procedimiento de solución de su elección y la recomendación de un plazo para cualquier procedimiento acordado, de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente Tratado y de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 12

Universalidad

Cada Estado parte alentará a los Estados que no sean partes en el presente Tratado a firmarlo, ratificarlo, aceptarlo, aprobarlo o adherirse a él, con el objetivo de lograr la adhesión universal de todos los Estados al Tratado.

Artículo 13

Firma

El presente Tratado estará abierto a la firma de todos los Estados en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York a partir del 20 de septiembre de 2017.

Artículo 14

Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

El presente Tratado estará sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados signatarios. El Tratado estará abierto a la adhesión.

Artículo 15

Entrada en vigor

1. El presente Tratado entrará en vigor 90 días después de la fecha en que se deposite el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
2. Para cualquier Estado que deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión después de la fecha de depósito del quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente Tratado entrará en vigor 90 días después de la fecha de depósito del correspondiente instrumento por ese Estado.

Artículo 16

Reservas

Los artículos del presente Tratado no podrán ser objeto de reservas.

Artículo 17

Duración y retiro

1. El presente Tratado tendrá una duración ilimitada.
2. Cada Estado parte tendrá derecho, en ejercicio de su soberanía nacional, a retirarse del presente Tratado si decide que acontecimientos extraordinarios relacionados con el objeto del Tratado han puesto en peligro sus intereses supremos. Dicho Estado parte comunicará su retiro al depositario mediante notificación en la que expondrá los acontecimientos extraordinarios que, a su juicio, han puesto en peligro sus intereses supremos.
3. El retiro solo surtirá efecto 12 meses después de la fecha de recepción de la notificación de retiro por el depositario. No obstante, si, a la expiración de ese

período de 12 meses, el Estado parte que ha notificado su retiro es parte en un conflicto armado, dicho Estado parte seguirá obligado por las disposiciones del presente Tratado y de cualquier protocolo adicional hasta que deje de ser parte en el conflicto armado.

Artículo 18 **Relación con otros acuerdos**

El presente Tratado se aplicará sin perjuicio de las obligaciones contraídas por los Estados partes respecto de acuerdos internacionales vigentes en los que sean partes, cuando esas obligaciones sean compatibles con el Tratado.

Artículo 19 **Depositario**

El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente Tratado.

Artículo 20 **Textos auténticos**

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso del presente Tratado serán igualmente auténticos.

HECHO en Nueva York el siete de julio de dos mil diecisiete.

المادة ١٨

علاقات هذه المعاهدة بالاتفاقات الأخرى

لا يخل تنفيذ هذه المعاهدة بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية القائمة، التي تكون هذه الدول أطرافاً فيها، حيثما تكون تلك الالتزامات متسقة مع هذه المعاهدة.

المادة ١٩

الوديع

يُعيّن الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه المعاهدة.

المادة ٢٠

حجية النصوص

تساوى نصوص هذه المعاهدة في الحجية باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

وحررت في نيويورك في اليوم السابع من تموز/يوليه عام ألفين وسبعة عشر.

٢ - بالنسبة لأية دولة تودع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها بعد تاريخ إيداع الصك الخمسين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد تسعين يوماً من التاريخ الذي تكون تلك الدولة قد أودعت فيه صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

المادة ١٦

التحفظات

لا تخضع مواد هذه المعاهدة للتحفظات.

المادة ١٧

المدة والانسحاب

١ - تُبرم هذه المعاهدة لمدة غير محدودة.

٢ - يحق لكل دولة طرف، وهي تمارس سيادتها الوطنية، أن تنسحب من هذه المعاهدة إذا رأت أن أحداثاً استثنائية تتعلق بموضوع هذه المعاهد قد أضرت بمصالح البلد العليا. وتخطر الوديع بهذا الانسحاب. ويشمل هذا الإخطار بياناً بالأحداث الاستثنائية التي تعتبر أنها أضرت بمصالحها العليا.

٣ - لا يصبح هذا الانسحاب نافذاً إلا بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تسلم الوديع للإخطار بالانسحاب. غير أنه إذا كانت الدولة الطرف المنسحبة، عند انقضاء فترة الاثني عشر شهراً المذكورة، طرفاً في نزاع مسلح، فإن الدولة الطرف تظل مقيدة بالالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة وأي بروتوكولات إضافية إلى الحين الذي لا تعود فيه طرفاً في نزاع مسلح.

والتوصية بمهلة زمنية لاتخاذ أي إجراء يتفق عليه، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المعاهدة وميثاق الأمم المتحدة.

المادة ١٢

عالمية المعاهدة

تشجع كل دولة طرف الدول غير الأطراف في هذه المعاهدة على التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، سعيا إلى تحقيق انضمام جميع الدول إلى هذه المعاهدة.

المادة ١٣

التوقيع

يُفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اعتبارا من ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧.

المادة ١٤

التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

تخضع هذه المعاهدة لتصديق الدول الموقعة عليها أو لقبولها أو موافقتها عليها. ويفتح باب الانضمام إلى المعاهدة.

المادة ١٥

بدء النفاذ

١ - يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع الصك الخمسين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

المادة ١٠

التعديلات

١ - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلات لهذه المعاهدة في أي وقت بعد دخولها حيز النفاذ. ويقدم نص التعديل المقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يعممه على جميع الدول الأطراف ويلتمس آراءها بشأن مدى إمكانية النظر في الاقتراح. وإذا أبلغت أغلبية الدول الأطراف الأمين العام للأمم المتحدة في موعد أقصاه تسعون يوما من تعميم نص التعديل المقترح أنها تؤيد مواصلة النظر في الاقتراح، يُنظر في الاقتراح في اجتماع الدول الأطراف المقبل أو في مؤتمر الاستعراض المقبل، أيهما أسبق.

٢ - يجوز لاجتماع الدول الأطراف أو لمؤتمر الاستعراض أن يوافق على التعديلات التي تُعتمد بتصويت إيجابي من أغلبية ثلثي الدول الأطراف. ويُبلغ الوديع جميع الدول الأطراف بأي تعديل معتمد.

٣ - يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى كل دولة طرف تودع صك تصديقها على التعديل أو قبولها له بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع أغلبية الدول الأطراف وقت الاعتماد لصكوك التصديق أو القبول هذه. ويدخل التعديل بعد ذلك حيز النفاذ بالنسبة إلى أي دولة طرف أخرى بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع صك تصديقها عليه أو قبولها له.

المادة ١١

تسوية المنازعات

١ - عندما تنشأ منازعة بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه المعاهدة أو تطبيقها، تتشاور الأطراف المعنية فيما بينها بغية تسوية المنازعة عن طريق التفاوض أو بوسائل سلمية أخرى تختارها، وفقا للمادة ٣٣ من ميثاق الأمم المتحدة.

٢ - يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يسهم في تسوية المنازعة، بما في ذلك من خلال عرض مساعيه الحميدة، ومطالبة الدول الأطراف المعنية بالشروع في إجراءات التسوية التي تختارها

٤ - بعد فترة خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر لاستعراض تطبيق المعاهدة والتقدم المحرز في تحقيق مقاصدها. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمرات الاستعراض الأخرى على فترات مدتها ست سنوات تحقيقاً للغرض ذاته، ما لم تتفق الدول الأطراف على خلاف ذلك.

٥ - تُدعى الدول غير الأطراف في هذه المعاهدة، وكذلك الكيانات ذات الصلة من منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إلى حضور اجتماعات الدول الأطراف والمؤتمرات الاستعراضية بصفة مراقب.

المادة ٩

التكاليف

١ - تتحمل الدول الأطراف وكذا الدول غير الأطراف في هذه المعاهدة المشاركة بصفة مراقب في اجتماعات الدول الأطراف ومؤتمرات الاستعراض والاجتماعات الاستثنائية للدول الأطراف تكاليف هذه الاجتماعات والمؤتمرات، وذلك وفقاً لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة المعدل على النحو الملائم.

٢ - تتحمل الدول الأطراف التكاليف التي يتكبدها الأمين العام للأمم المتحدة في تعميم الإعلانات المقدمة بموجب المادة ٢ والتقارير المقدمة بموجب المادة ٤ والتعديلات المقترحة بموجب المادة ١٠ من هذه المعاهدة، وذلك وفقاً لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة المعدل على النحو الملائم.

٣ - ينبغي أن تتحمل الدول الأطراف التي تنطبق عليها تدابير التحقق المطلوبة بموجب المادة ٤ التكاليف المتصلة بتنفيذ هذه التدابير، فضلاً عن التكاليف المتصلة بتدمير الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، وإزالة برامج الأسلحة النووية، بما في ذلك إزالة أو تحويل جميع المرافق ذات الصلة بالأسلحة النووية.

٦ - تقع على عاتق الدولة الطرف التي استخدمت أو جرّبت أسلحة نووية أو أيّ أجهزة متفجرة نووية أخرى مسؤولية تقديم مساعدة كافية إلى الدول الأطراف المتضررة، لأغراض مساعدة الضحايا والإصلاح البيئي، دون المساس بأيّ واجبات أو التزامات أخرى قد تُنات بها بموجب القانون الدولي.

المادة ٨

اجتماع الدول الأطراف

١ - تجتمع الدول الأطراف بانتظام للنظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه المعاهدة أو تنفيذها، ولاتخاذ قرارات بشأنها عند الضرورة، وفقاً لأحكامها ذات الصلة، وبشأن التدابير الفعالة لنزع السلاح النووي، بما في ذلك:

(أ) تنفيذ هذه المعاهدة وحالتها؛

(ب) التدابير المتعلقة بإزالة برامج الأسلحة النووية بطريقة يمكن التحقق منها ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها، بما في ذلك البروتوكولات الإضافية لهذه المعاهدة؛

(ج) أي مسائل أخرى تطرح عملاً بأحكام هذه المعاهدة أو اتساقاً معها.

٢ - يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للدول الأطراف في غضون عام واحد من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماعات الأخرى للدول الأطراف كل سنتين، ما لم تتفق الدول الأطراف على خلاف ذلك. ويعتمد اجتماع الدول الأطراف نظامه الداخلي في دورته الأولى. وريثما يتم اعتماد هذا النظام الداخلي، يُطبّق النظام الداخلي لمؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على صك مُلزم قانوناً لحظر الأسلحة النووية، تمهيداً للقضاء التام عليها.

٣ - يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد اجتماعات استثنائية للدول الأطراف، حسب الاقتضاء، بناء على طلب خطي من أي دولة طرف، شريطة أن يؤيد هذا الطلب ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف.

للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجب التطبيق، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفسي، وتميئ لهم كذلك أسباب الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

٢ - تقوم كل دولة طرف، فيما يتعلق بالمناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها التي تكون ملوثة نتيجة الأنشطة المتصلة بتجريب أو استخدام الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، باتخاذ التدابير الضرورية والمناسبة من أجل الإصلاح البيئي للمناطق الملوثة.

٣ - لا تخل الالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين ١ و ٢ أعلاه بواجبات والتزامات أي دول أخرى بموجب القانون الدولي أو الاتفاقات الثنائية.

المادة ٧

التعاون وتوفير المساعدة على الصعيد الدولي

١ - تتعاون كل دولة طرف مع سائر الدول الأطراف من أجل تيسير تنفيذ هذه المعاهدة.

٢ - يحق لكل دولة طرف، وفاءً بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، أن تلتزم المساعدة وأن تتلقاها من الدول الأطراف الأخرى، حيثما كان ذلك ممكناً.

٣ - تقدم كل دولة طرف قادرة على ذلك المساعدة التقنية والمادية والمالية للدول الأطراف المتضررة من استخدام الأسلحة النووية أو تجريبها، من أجل مواصلة تنفيذ هذه المعاهدة.

٤ - تقدم كل دولة طرف قادرة على ذلك المساعدة لضحايا استخدام أو تجريب الأسلحة النووية أو الأجهزة النووية المتفجرة الأخرى.

٥ - يجوز تقديم المساعدة بمقتضى هذه المادة عن طريق جهات شتى منها منظومة الأمم المتحدة، أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية، أو المنظمات أو المؤسسات غير الحكومية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أو على أساس ثنائي.

إزالة هذه الأسلحة أو الأجهزة المتفجرة الأخرى، تقدم تلك الدولة الطرف إلى الأمين العام للأمم المتحدة إعلاناً تشير فيه إلى أنها وفّت بالتزاماتها بموجب هذه المادة.

٥ - تقدم كل دولة طرف تنطبق عليها هذه المادة تقريراً إلى كل اجتماع من اجتماعات الدول الأطراف وكل مؤتمر استعراض عن التقدم المحرز صوب تنفيذ التزاماتها بموجب هذه المادة، إلى حين الوفاء بهذه الالتزامات.

٦ - تعيّن الدول الأطراف سلطة أو سلطات دولية مختصة للتفاوض والتحقق من إزالة برامج الأسلحة النووية أو تحويلها بطريقة لا رجعة فيه، بما في ذلك إزالة جميع المرافق المتصلة بالأسلحة النووية أو تحويلها بطريقة لا رجعة فيه، وفقاً لفقرات ١ و ٢ و ٣ من هذه المادة. وفي حالة عدم إجراء هذا التعيين قبل بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى دولة طرف تنطبق عليها الفقرة ١ أو ٢ من هذه المادة، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع استثنائي للدول الأطراف لاتخاذ أي قرارات قد تكون مطلوبة.

المادة ٥

التنفيذ على الصعيد الوطني

١ - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه المعاهدة.

٢ - تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الملائمة القانونية والإدارية وغيرها، بما في ذلك فرض عقوبات جزائية، لمنع وقمع أي نشاط محظور على أي دولة طرف بموجب هذه المعاهدة يقوم به أشخاص مشمولون بولايتها أو خاضعون لسيطرتها أو يقع في إقليم خاضع لولايتها أو لسيطرتها.

المادة ٦

مساعدة الضحايا وإصلاح البيئة

١ - تقوم كل دولة طرف بتوفير ما يكفي من المساعدة المراعية للسن ونوع الجنس، دون تمييز، للأشخاص المشمولين بولايتها المتضررين من استخدام الأسلحة النووية أو من تجريبها، وفقاً

على هذه الالتزامات المتعلقة بالضمانات دون مساس بأي صكوك إضافية ذات صلة قد تعتمد عليها في المستقبل.

٢ - بصرف النظر عن الفقرة (أ) من المادة ١، يتعين على كل دولة طرف تمتلك أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو تحوزها أو تسيطر عليها أن تزيلها من الوضع التشغيلي، وأن تدمرها في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز ذلك موعداً يحدده الاجتماع الأول للدول الأطراف، وفقاً لخطة ملزمة قانوناً ومحددة زمنياً من أجل إزالة برنامج الأسلحة النووية لتلك الدولة الطرف بطريقة لا رجعة فيها ويمكن التحقق منها، بما في ذلك إزالة جميع المرافق المتصلة بالأسلحة النووية أو تحويلها بطريقة لا رجعة فيها. وتقوم الدولة الطرف، في موعد أقصاه ستون يوماً من بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة لتلك الدولة الطرف، بتقديم هذه الخطة إلى اجتماع الدول الأطراف أو إلى السلطة الدولية المختصة التي تعيّن الدول الأطراف. ويجري التفاوض بعد ذلك على هذه الخطة مع السلطة الدولية المختصة التي تقدمها إلى الاجتماع اللاحق للدول الأطراف أو إلى مؤتمر الاستعراض اللاحق، أيهما أسبق، للموافقة عليها وفقاً لنظامه الداخلي.

٣ - تقوم الدولة الطرف التي تنطبق عليها الفقرة ٢ أعلاه بإبرام اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يكفي لتقديم ضمان موثوق به بعدم تحويل المواد النووية المعلنة من الأنشطة النووية السلمية وعدم وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة في الدولة ككل. ويبدأ التفاوض بشأن هذا الاتفاق في موعد أقصاه التاريخ الذي ينتهي فيه تنفيذ الخطة المشار إليها في الفقرة ٢. ويبدأ نفاذ الاتفاق في موعد أقصاه ثمانية عشر شهراً من تاريخ بدء المفاوضات. وتحافظ تلك الدولة الطرف بعد ذلك، كحد أدنى، على هذه الالتزامات المتعلقة بالضمانات، دون مساس بأي صكوك إضافية ذات صلة قد تعتمد عليها في المستقبل. وبعد بدء نفاذ الاتفاق المشار إليه في هذه الفقرة، تقدم الدولة الطرف إلى الأمين العام للأمم المتحدة إعلاناً نهائياً يفيد بأنها وفّت بالتزاماتها بموجب هذه المادة.

٤ - بصرف النظر عن الفقرتين (ب) و (ز) من المادة ١، تكفل كل دولة طرف توجد في إقليمها أو في أي مكان مشمول بولايتها أو خاضع لسيطرتها أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى تمتلكها دولة أخرى أو تحوزها أو تسيطر عليها إزالة هذه الأسلحة على الفور، في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز ذلك موعداً يحدده الاجتماع الأول للدول الأطراف. ولدى

المادة ٣

الضمانات

١ - يتعين على كل دولة طرف لا تنطبق عليها الفقرتان ١ أو ٢ من المادة ٤ أن تحافظ، كحد أدنى، على التزاماتها بموجب ضمانات الوكالة الدولي للطاقة الذرية التي كانت سارية وقت بدء نفاذ هذه المعاهدة، دون المساس بأي صكوك إضافية ذات صلة قد تعتمدها في المستقبل.

٢ - يتعين على كل دولة طرف لا تنطبق عليها الفقرتان ١ و ٢ من المادة ٤ أن تبرم اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (INFCIRC/153 (Corrected)) وأن تنفذه إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد. ويبدأ التفاوض بشأن هذا الاتفاق في غضون ١٨٠ يوما من بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة لتلك الدولة الطرف. ويبدأ نفاذ الاتفاق في موعد أقصاه ١٨ شهرا من تاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة لتلك الدولة الطرف. وتحافظ كل دولة طرف بعد ذلك على هذه الالتزامات، دون مساس بأي صكوك إضافية ذات صلة قد تعتمدها في المستقبل.

المادة ٤

السعي إلى القضاء التام على الأسلحة النووية

١ - يتعين على كل دولة طرف كانت بعد ٧ تموز/يوليه ٢٠١٧ تمتلك أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو كانت تحوزها أو تسيطر عليها وقامت بإزالة برنامج أسلحتها النووية، بما في ذلك إزالة جميع المرافق المتصلة بالأسلحة النووية أو تحويلها بصورة لا رجعة فيها، قبل بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إليها، أن تتعاون مع السلطة الدولية المختصة المعنية عملا بالفقرة ٦ من هذه المادة لغرض التحقق من إزالة برنامج أسلحتها النووية بطريقة لا رجعة فيه. وتبلغ السلطة الدولية المختصة الدول الأطراف. وتبرم تلك الدولة الطرف اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يكفي لتقديم ضمان موثوق به بعدم تحويل المواد النووية المعلنة من الأنشطة النووية السلمية وعدم وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة في تلك الدولة الطرف ككل. ويبدأ التفاوض بشأن هذا الاتفاق في غضون ١٨٠ يوما من تاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة لتلك الدولة الطرف. ويبدأ نفاذ الاتفاق في موعد أقصاه ثمانية عشر شهرا من بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة لتلك الدولة الطرف. وتحافظ تلك الدولة الطرف بعد ذلك، كحد أدنى،

(هـ) مساعدة أو تشجيع أو حث أيّ جهة بأي طريقة على المشاركة في أي نشاط محظور على الدولة الطرف بموجب هذه المعاهدة؛

(و) التماس أو تلقي أيّ مساعدة بأي طريقة كانت من أيّ جهة من أجل المشاركة في أي نشاط محظور على الدولة الطرف بموجب هذه المعاهدة؛

(ز) السماح بأي عملية لإقامة أيّ أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو نصبها أو نشرها في إقليمها أو في أي مكان مشمول بولايتها أو خاضع لسيطرتها.

المادة ٢

الإعلانات

١ - تقدم كل دولة طرف إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في موعد أقصاه ثلاثين يوماً بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف إعلاناً تقوم من خلال بما يلي:

(أ) إعلان ما إذا كانت تمتلك أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أو تحوزها أو تسيطر عليها، وما إذا كانت قد أزالَت برنامج أسلحتها النووية، بما في ذلك إزالة جميع المرافق المتصلة بالأسلحة النووية أو تحويلها بطريقة لا رجعة فيها، قبل بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف؛

(ب) بصرف النظر عن أحكام الفقرة (أ) من المادة ١، إعلان ما إذا كانت تمتلك أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو تحوزها أو تسيطر عليها؛

(ج) بصرف النظر عن أحكام الفقرة (ز) من المادة ١، إعلان ما إذا كانت أيّ أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى توجد في إقليمها أو في أي مكان مشمول بولايتها أو خاضع لسيطرتها وتكون مملوكة لدولة أخرى أو في حيازة هذه الدولة أو تحت سيطرتها.

٢ - يحيل الأمين العام للأمم المتحدة كل ما يتلقاه من هذه الإعلانات إلى الدول الأطراف.

وإذ تسلم أيضا بأهمية التثقيف في مجال السلام ونزع السلاح بجميع جوانبه والتوعية بمخاطر وعواقب الأسلحة النووية على الأجيال الحالية والمقبلة، والتزاماً منها بنشر مبادئ هذه المعاهدة وقواعدها،

وإذ تؤكد على دور الضمير العام في ترسيخ مبادئ الإنسانية كما يتجلى في النداء العالمي للقضاء التام على الأسلحة النووية، وإذ تقر بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وغيرهما من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، والمنظمات غير الحكومية، والزعماء الدينيون، والبرلمانيون، والأكاديميون، وضحايا القنبلة الذرية (الهيباكوشا)، من أجل بلوغ هذه الغاية،

اتفقت على ما يلي:

المادة ١

المحظورات

١ - تتعهد كل دولة طرف ألا تقوم في أي ظرف من الظروف بما يلي:

- (أ) تطوير أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو تجريبها أو إنتاجها أو صنعها أو اقتنائها على نحو آخر أو حيازتها أو تكديسها؛
- (ب) نقل أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، أو السيطرة على تلك الأسلحة أو الأجهزة إلى أي جهة متلقية أياً كانت، لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة؛
- (ج) تلقي نقل الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى أو السيطرة عليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛
- (د) استخدام الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى أو التهديد باستخدامها؛

وإذا تسلم بأن حظر الأسلحة النووية بصفة ملزمة قانوناً يمثل مساهمة هامة نحو إقامة عالم خال من الأسلحة النووية والحفاظ عليه، بما في ذلك القضاء على الأسلحة النووية بطريقة شفافة لا رجعة فيها ويمكن التحقق منها، وتصميماً منها على العمل من أجل بلوغ هذه الغاية،

وتصميماً منها على العمل من أجل إحراز تقدم فعلي نحو نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة فعالة،

وإذا تؤكد من جديد وجود التزام بالسعي بحسن نية إلى إجراء واختتام مفاوضات تفضي إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة،

وإذا تؤكد من جديد أيضاً أن التنفيذ الكامل والفعال لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي هي حجر الزاوية في نظام نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي، يؤدي دوراً حيوياً في تعزيز السلام والأمن الدوليين،

وإذا تدرك الأهمية الحيوية التي تتسم بها معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ونظام التحقق الخاص بها باعتبارهما عنصراً أساسياً من عناصر نظام نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي،

وإذا تؤكد من جديد الاقتناع بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية معترف بها دولياً على أساس ترتيبات يجري التوصل إليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية أمر يعزز السلام والأمن على الصعيدين العالمي والإقليمي، ويوطد نظام عدم الانتشار النووي، ويسهم في بلوغ أهداف نزع السلاح النووي،

وإذا تؤكد أنه ليس في هذه المعاهدة ما يمكن تفسيره على أنه يخل بحق الدول الأطراف فيها غير القابل للتصرف في تطوير البحوث في مجال الطاقة النووية وإنتاج هذه الطاقة واستخدامها في الأغراض السلمية دون أي تمييز،

وإذا تسلم بأن مشاركة المرأة والرجل معاً مشاركة متساوية وكاملة وفعالة عامل أساسي لتعزيز وتحقيق السلام والأمن الدائمين، والتزاماً منها بدعم وتعزيز مشاركة المرأة مشاركة فعالة في نزع السلاح النووي،

وإذ تسلم بالأثر غير المتناسب الذي تخلفه الأنشطة النووية على الشعوب الأصلية،

وإذ تؤكد من جديد ضرورة امتثال جميع الدول في كل وقت لأحكام القانون الدولي الواجب التطبيق، بما في ذلك أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،

وإذ تستند إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المبدأ الذي مؤداه أن حق أطراف نزاع مسلح في اختيار أساليب أو وسائل الحرب ليس بالحق غير المحدود، وقاعدة التمييز، وحظر الهجمات العشوائية، وقاعدتي التناسب واتخاذ الاحتياطات في الهجوم، وحظر استخدام الأسلحة التي تسبب بطبيعتها في إصابات مفرطة أو معاناة لا مبرر لها، وقواعد حماية البيئة الطبيعية،

وإذ تعتبر أن أي استخدام للأسلحة النووية سيتنافى مع قواعد القانون الدولي الساري على النزاعات المسلحة، وبخاصة مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني،

وإذ تؤكد من جديد أن أي استخدام للأسلحة النووية أمرٌ تأباه مبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام،

وإذ تشير إلى أن من واجب الدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية لأية دولة أو ضد استقلالها السياسي أو على أي نحو آخر منافٍ لمقاصد الأمم المتحدة، وأن تعزيز إقامة السلم والأمن الدوليين وصونهما ينبغي أن يتم بتحويل أقل قدر من موارد العالم البشرية والاقتصادية إلى الأسلحة،

وإذ تشير أيضاً إلى القرار الأول الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٤ كانون الثاني/يناير ١٩٤٦ والقرارات اللاحقة الداعية إلى القضاء على الأسلحة النووية،

وإذ يساورها القلق إزاء بطء وتيرة نزع السلاح النووي، واستمرار الاعتماد على الأسلحة النووية في المفاهيم والعقائد والسياسات العسكرية والأمنية، وإزاء هدر الموارد الاقتصادية والبشرية على برامج إنتاج الأسلحة النووية وصيانتها وتحديثها،

معاهدة بشأن حظر الأسلحة النووية

إنَّ الدول الأطراف في هذه المعاهدة،

رغبةً منها في الإسهام في تحقيق الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء العواقب الإنسانية الكارثية التي قد تنجم عن أي استخدام للأسلحة النووية، وإذ تدرك ما يستتبعه ذلك من ضرورة القضاء التام على هذه الأسلحة، الذي يظل السبيل الوحيد لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى أبداً في أي ظرف من الظروف،

وإذ تدرك المخاطر التي يشكلها استمرار وجود الأسلحة النووية، بما في ذلك من جراء أي تفجير لأسلحة نووية يحدث عَرَضاً أو عن سوء تقدير أو عن عمد، وإذ تؤكد أن هذه المخاطر تمس أمن البشرية جمعاء، وأن جميع الدول تتقاسم مسؤولية منع أي استخدام للأسلحة النووية،

وإذ تدرك أن العواقب الكارثية للأسلحة النووية لا يمكن معالجتها بصورة كافية، وأنها تتخطى الحدود الوطنية، ولها تداعيات خطيرة على بقاء الإنسان وعلى البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والاقتصاد العالمي، وعلى الأمن الغذائي وصحة الأجيال الحالية والمقبلة، وأنها تؤثر تأثيراً غير متناسب على النساء والفتيات، بما في ذلك نتيجة للإشعاعات المؤينة،

وإذ تقر بالضرورات الأخلاقية التي تحتم نزع السلاح النووي وبالحاجة الملحة إلى إيجاد عالم خالٍ من الأسلحة النووية والحفاظ عليه، باعتبار ذلك أمراً يخدم المصلحة العامة خير خدمة في جميع أرجاء المعمورة، إذ إنه يخدم المصالح الأمنية الوطنية والجماعية على حدٍّ سواء،

وإذ تضع في اعتبارها المعاناة غير المقبولة التي يقاسيها ضحايا استخدام الأسلحة النووية (الهيباكوشا)، فضلاً عن المتضررين من تجارب الأسلحة النووية، والضرر الذي يلحق بهم،

معاهدة بشأن حظر الأسلحة النووية



الأمم المتحدة

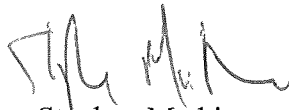
٢٠١٧

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons adopted on 7 July 2017, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires, adopté le 7 juillet 2017, dont l'original est déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

For the Secretary-General,
The Assistant Secretary-General
in charge of the Office of Legal Affairs

Pour le Secrétaire général,
Le Sous-Secrétaire général chargé du
Bureau des affaires juridiques



Stephen Mathias

United Nations
New York, 8 August 2017

Organisation des Nations Unies
New York, le 8 août 2017

Certified true copy (XXVI-9)
Copie certifiée conforme (XXVI-9)
August 2017/août 2017

Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir

Negara-Negara Pihak pada Traktat ini,

Bertekad untuk berkontribusi pada perwujudan tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Sangat khawatir akan konsekuensi kemanusiaan yang parah yang akan timbul dari penggunaan apa pun dari senjata nuklir, dan mengakui kebutuhan logis untuk menghapus senjata tersebut secara menyeluruh, yang tetap menjadi satu-satunya cara untuk memastikan bahwa senjata nuklir tidak akan digunakan lagi dalam keadaan apa pun,

Memperhatikan risiko-risiko dari masih adanya senjata nuklir, termasuk dari detonasi senjata nuklir apa pun secara tidak sengaja, miscalculasi, atau kesalahan desain, dan menegaskan bahwa risiko tersebut terkait dengan keamanan seluruh umat manusia, dan bahwa semua Negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah penggunaan apa pun dari senjata nuklir,

Menyadari bahwa konsekuensi parah dari senjata nuklir tidak dapat secara cukup diatasi, melewati batas wilayah nasional, memberikan dampak buruk bagi keselamatan manusia, lingkungan, perkembangan sosial ekonomi, ekonomi global, ketahanan pangan, dan kesehatan dari generasi sekarang dan masa depan, dan memiliki sebuah dampak yang tidak seimbang pada perempuan dan anak perempuan, termasuk akibat dari radiasi ion,

Mengakui kepentingan etis bagi pelucutan senjata nuklir dan urgensi untuk mencapai dan menjaga sebuah dunia yang bebas dari senjata nuklir, yang merupakan barang publik global di tingkat tertinggi, yang memberikan manfaat, baik pada kepentingan keamanan nasional maupun kolektif,

Memperhatikan penderitaan yang tidak tertahankan dan luka yang ditimbulkan pada *hibakusha* (para korban senjata nuklir), serta pada mereka yang terdampak oleh uji coba senjata nuklir,

Mengakui dampak tidak seimbang dari aktivitas senjata nuklir pada masyarakat setempat,

Menegaskan kembali kebutuhan bagi semua Negara untuk setiap saat patuh pada hukum internasional yang berlaku, termasuk hukum humanitarian internasional dan hukum hak asasi manusia internasional,

Mendasarkan Negara-Negara Pihak pada prinsip dan aturan hukum humanitarian internasional, khususnya prinsip bahwa hak para pihak dalam suatu konflik bersenjata untuk memilih alat dan cara berperang adalah tidak takterbatas, aturan pembedaan, larangan terhadap serangan membabi buta, aturan mengenai proporsionalitas dan kehati-hatian dalam

serangan, larangan terhadap penggunaan senjata yang mengakibatkan luka parah atau penderitaan yang tidak perlu, dan aturan bagi perlindungan lingkungan hidup,

Mempertimbangkan bahwa penggunaan apa pun dari senjata nuklir akan bertentangan dengan aturan hukum internasional yang berlaku pada masa konflik bersenjata, khususnya prinsip dan aturan hukum humanitarian internasional,

Menegaskan kembali bahwa penggunaan apa pun dari senjata nuklir juga akan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan hati nurani publik,

Mengingat kembali bahwa, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara-Negara harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari penggunaan ancaman atau kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik setiap Negara mana pun, atau dalam tindakan apa pun yang tidak sejalan dengan Tujuan-Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan bahwa pembentukan dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional harus ditingkatkan dengan sedikit mungkin pengalihan bagi persenjataan atas sumber daya manusia dan ekonomi dunia,

Mengingat kembali resolusi pertama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi pada 24 Januari 1946, dan resolusi-resolusi berikutnya yang terkait yang mendorong penghapusan senjata nuklir,

Prihatin oleh lambannya langkah pelucutan senjata nuklir, ketergantungan terus-menerus atas senjata nuklir dalam konsep, doktrin, dan kebijakan militer dan keamanan, dan terbuangnya sumber daya manusia dan ekonomi pada program untuk produksi, pemeliharaan, dan modernisasi senjata nuklir,

Mengakui bahwa larangan senjata nuklir yang mengikat secara hukum merupakan sebuah kontribusi penting terhadap pencapaian dan pemeliharaan sebuah dunia yang bebas dari senjata nuklir, termasuk penghapusan senjata nuklir yang tidak tergantikan, dapat diverifikasi dan secara transparan, dan bertekad untuk bertindak menuju tujuan akhir tersebut,

Bertekad untuk bertindak dengan tujuan untuk mencapai progres yang efektif terhadap pelucutan umum dan lengkap di bawah kendali internasional yang ketat dan efektif,

Menegaskan kembali bahwa terdapat sebuah kewajiban untuk mengupayakan dengan itikad baik dan menyelesaikan negosiasi yang mengarah pada pelucutan senjata nuklir dalam segala aspeknya di bawah kendali internasional yang ketat dan efektif,

Menegaskan kembali pula bahwa implementasi Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir yang menyeluruh dan efektif, yang berperan sebagai landasan utama bagi rezim pelucutan dan nonproliferasi senjata nuklir, memiliki peran yang penting dalam meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional,

Mengakui pentingnya Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Senjata Nuklir dan rezim verifikasi sebagai sebuah unsur utama bagi rezim pelucutan dan nonproliferasi senjata nuklir,

Menegaskan kembali keyakinan bahwa pembentukan zona bebas senjata nuklir, yang diakui secara internasional berdasarkan pengaturan yang disepakati secara bebas di antara Negara-Negara di wilayah terkait, meningkatkan perdamaian dan keamanan global dan kawasan, memperkuat rezim nonproliferasi senjata nuklir, dan berkontribusi terhadap perwujudan tujuan dari pelucutan senjata nuklir,

Menegaskan bahwa tidak ada dalam Traktat ini yang ditafsirkan sebagai memengaruhi hak tidak terpisahkan dari Negara-Negara Pihaknya untuk mengembangkan penelitian, produksi, dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai tanpa diskriminasi,

Mengakui bahwa partisipasi yang setara, penuh, dan efektif baik bagi perempuan maupun laki-laki adalah faktor esensial untuk peningkatan dan pencapaian perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan, dan berkomitmen untuk mendukung dan memperkuat partisipasi perempuan yang efektif dalam pelucutan senjata nuklir,

Mengakui pula pentingnya pendidikan perdamaian dan pelucutan senjata dalam segala aspeknya dan meningkatkan kesadaran akan risiko dan konsekuensi senjata nuklir bagi generasi sekarang dan mendatang, serta berkomitmen untuk mendiseminasikan prinsip dan norma Traktat ini,

Menekankan peran hati nurani publik dalam memajukan prinsip kemanusiaan yang tercerminkan oleh dorongan bagi penghapusan menyeluruh senjata nuklir dan mengakui upaya ke arah itu yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, organisasi internasional dan regional lainnya, organisasi nonpemerintah, para pemuka agama, para anggota parlemen, akademisi, serta *hibakusha*,

Telah menyepakati sebagai berikut:

Pasal 1

Larangan

1. Setiap Negara Pihak dalam keadaan apa pun berkomitmen untuk tidak:

- a) Mengembangkan, menguji coba, memproduksi, memanufaktur, atau memperoleh, menguasai atau menimbun persediaan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya;
- b) Mengalihkan kepada siapa pun penerima senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya atau mengendalikan senjata atau alat peledak tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c) Menerima pengalihan atau kendali atas senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d) Menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya;

- e) Membantu, mendukung, atau membujuk siapa pun, dengan cara apa pun, untuk terlibat dalam semua aktivitas yang dilarang bagi Negara Pihak berdasarkan Traktat ini;
- f) Mencari atau menerima bantuan apa pun, dengan cara apa pun, dari siapa pun untuk terlibat dalam segala aktivitas yang dilarang bagi Negara Pihak berdasarkan Traktat ini;
- g) Mengizinkan penempatan, instalasi, atau penyebaran apa pun dari senjata nuklir atau alat peledak nuklir apa pun lainnya di wilayahnya atau di lokasi mana pun yang berada dalam yurisdiksi atau kendalinya.

Pasal 2

Deklarasi

1. Setiap Negara Pihak wajib menyerahkan kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, paling lambat 30 hari setelah Traktat ini berlaku bagi Negara Pihak tersebut, sebuah deklarasi yang isinya wajib:

- a) Mendeklarasikan apakah ia pernah memiliki, menguasai, atau mengendalikan senjata nuklir atau alat peledak nuklir dan telah menghapus program senjata nuklirnya, termasuk penghapusan atau konversi yang tidak tergantung atas semua fasilitas terkait senjata nuklir, sebelum berlakunya Traktat ini bagi Negara Pihak tersebut;
- b) Terlepas dari Pasal 1 (a), mendeklarasikan apakah ia sedang memiliki, menguasai, atau mengendalikan senjata nuklir atau alat peledak nuklir apa pun lainnya;
- c) Terlepas dari Pasal 1 (g), mendeklarasikan apakah terdapat senjata nuklir atau alat peledak nuklir apa pun lainnya di wilayah atau lokasi mana pun di bawah yurisdiksi atau kendalinya, yang dimiliki, dikuasai, atau dikendalikan oleh Negara lain.

2. Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib meneruskan semua deklarasi yang diterimanya tersebut kepada Negara-Negara Pihak.

Pasal 3

Pengamanan

1. Setiap Negara Pihak yang terhadapnya Pasal 4, Ayat 1 atau 2, tidak berlaku wajib, sedikitnya, memelihara kewajiban pengamanan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang berlaku pada saat berlakunya Traktat ini, tanpa mengesampingkan adanya instrumen tambahan terkait apa pun lainnya yang mungkin diadopsi di masa yang akan datang.

2. Setiap Negara Pihak yang terhadapnya Pasal 4 Ayat 1 atau 2 tidak berlaku, yang belum melakukannya, wajib menyelesaikan sebuah perjanjian pengamanan komprehensif dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan memberlakukan perjanjian tersebut (INFCIRC/153 Diperbaiki)). Negosiasi perjanjian tersebut wajib dimulai dalam kurun waktu 180 hari dari mulai berlakunya Traktat ini bagi Negara Pihak tersebut. Perjanjian tersebut wajib mulai berlaku paling lambat 18 bulan dari berlakunya Traktat ini bagi Negara Pihak tersebut. Setiap Negara Pihak setelahnya wajib menjaga kewajiban tersebut tanpa mengesampingkan adanya instrumen tambahan terkait apa pun lainnya yang mungkin diadopsi di masa yang akan datang.

Pasal 4

Menuju Penghapusan Menyeluruh Senjata Nuklir

1. Setiap Negara Pihak yang setelah tanggal 7 Juli 2017 telah memiliki, menguasai, atau mengendalikan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya dan menghapuskan program senjata nuklirnya, termasuk penghapusan atau konversi yang tidak tergantung atas fasilitas terkait senjata nuklir, sebelum berlakunya Traktat ini baginya, wajib bekerja sama dengan otoritas internasional yang kompeten yang ditunjuk berdasarkan Ayat 6 Pasal ini untuk memverifikasi penghapusan yang tidak tergantung atas program senjata nuklirnya. Otoritas internasional yang kompeten tersebut wajib melaporkan kepada Negara-Negara Pihak. Negara Pihak tersebut wajib menyepakati sebuah perjanjian pengamanan yang memadai dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk memberikan jaminan yang kredibel terkait tidak adanya pengalihan bahan nuklir yang dideklarasikan dari aktivitas nuklir yang damai dan dari ketiadaan bahan atau aktivitas nuklir yang tidak dideklarasikan di Negara Pihak tersebut secara keseluruhan. Negosiasi perjanjian tersebut wajib dimulai dalam kurun waktu 180 hari dari berlakunya Traktat ini untuk Negara Pihak tersebut. Perjanjian tersebut wajib mulai berlaku paling lambat 18 bulan dari berlakunya Traktat ini bagi Negara Pihak tersebut. Negara Pihak tersebut setelahnya wajib, setidaknya, memelihara kewajiban pengamanan tersebut, tanpa mengesampingkan instrumen tambahan terkait apa pun lainnya yang mungkin diadopsi di masa yang akan datang.

2. Terlepas dari Pasal 1 (a), setiap Negara Pihak yang memiliki, menguasai, atau mengendalikan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya wajib dengan segera melepaskannya dari status operasional, dan menghancurkannya sesegera mungkin, tetapi paling lambat pada tenggat waktu yang akan ditentukan oleh pertemuan pertama Negara-Negara Pihak, sesuai dengan rencana dan waktu yang mengikat secara hukum, untuk penghapusan program senjata nuklir Negara Pihak tersebut yang tidak tergantung, dan diverifikasi, termasuk penghapusan atau konversi yang tidak tergantung atas semua fasilitas

terkait senjata nuklir. Negara Pihak tersebut, paling lambat 60 hari dari berlakunya Traktat ini terhadapnya, wajib menyerahkan rencana ini kepada Negara-Negara Pihak atau kepada otoritas internasional yang kompeten yang ditunjuk oleh Negara-Negara Pihak. Rencana tersebut, kemudian, wajib dinegosiasikan dengan otoritas internasional yang kompeten, yang kemudian wajib menyerahkannya ke pertemuan Negara-Negara Pihak atau konferensi revidi selanjutnya yang terjadi lebih dahulu untuk persetujuan sesuai dengan aturan prosedurnya.

3. Negara Pihak yang terhadapnya Ayat 2 di atas berlaku wajib menyepakati sebuah perjanjian pengamanan yang memadai dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk memberikan jaminan yang kredibel terkait tidak didiversikannya bahan nuklir yang dideklarasikan dari aktivitas nuklir yang damai dan dari ketiadaan bahan atau aktivitas nuklir yang tidak dideklarasikan di Negara (Pihak) tersebut secara keseluruhan. Negosiasi perjanjian tersebut wajib dimulai paling lambat pada tanggal ketika implementasi rencana yang dirujuk pada Ayat 2 diselesaikan. Perjanjian ini wajib mulai berlaku paling lambat 18 bulan setelah tanggal negosiasi dimulai. Negara Pihak tersebut setelahnya wajib, setidaknya, memelihara kewajiban pengamanan tersebut, tanpa mengesampingkan instrumen tambahan terkait apa pun lainnya yang mungkin diadopsi di masa yang akan datang. Setelah berlakunya perjanjian yang dirujuk dalam Ayat ini, Negara Pihak tersebut wajib menyerahkan sebuah deklarasi final bahwa ia telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal ini kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

4. Terlepas dari Pasal 1 (b) dan (g), setiap Negara Pihak yang memiliki senjata nuklir atau alat peledak nuklir apa pun lainnya, di wilayahnya atau di lokasi mana pun yang berada di bawah yurisdiksi atau kendalinya yang dimiliki, dikuasai, atau dikendalikan oleh Negara lain, wajib memastikan pemusnahan senjata tersebut secara cepat, sesegera mungkin, tidak lebih dari tenggat waktu yang ditentukan dalam pertemuan pertama Negara-Negara Pihak. Setelah pemusnahan senjata atau alat peledak lain tersebut, Negara Pihak tersebut wajib menyerahkan sebuah deklarasi bahwa ia telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal ini kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

5. Setiap Negara Pihak, yang terhadapnya Pasal ini berlaku, wajib menyerahkan laporan ke setiap pertemuan Negara-Negara Pihak dan setiap konferensi revidi tentang kemajuan yang dicapai atas implementasi kewajibannya berdasarkan Pasal ini sampai pada saat kewajiban tersebut terpenuhi.

6. Negara-Negara Pihak wajib menunjuk sebuah otoritas atau otoritas-otoritas internasional yang kompeten untuk menegosiasikan dan memverifikasi penghapusan yang tidak tergantikan atas program senjata nuklir, termasuk penghapusan atau konversi yang tidak tergantikan atas fasilitas terkait senjata nuklir sesuai dengan Ayat 1, 2, dan 3 Pasal ini. Apabila penunjukan tersebut belum dilakukan sebelum berlakunya Traktat ini bagi Negara Pihak yang

terhadapnya Ayat 1 atau 2 Pasal ini berlaku, Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengadakan pertemuan luar biasa Negara-Negara Pihak untuk mengambil keputusan yang mungkin diperlukan.

Pasal 5

Implementasi Nasional

1. Setiap Negara Pihak wajib mengadopsi upaya yang diperlukan untuk mengimplementasikan kewajibannya berdasarkan Traktat ini.
2. Setiap Negara Pihak wajib melakukan semua upaya hukum, administratif, dan tindakan lainnya yang sesuai, termasuk pengenaan sanksi pidana untuk mencegah dan menekan aktivitas apa pun yang dilarang terhadap suatu Negara Pihak berdasarkan Traktat ini yang dilakukan oleh perorangan atau yang dilakukan di wilayah yang berada dalam yurisdiksi atau kendalinya.

Pasal 6

Bantuan Kepada Korban dan Pemulihan Lingkungan

1. Setiap Negara Pihak wajib, yang berkaitan dengan para individu yang berada dalam yurisdiksinya, yang terdampak oleh penggunaan atau uji coba senjata nuklir, sesuai dengan hukum humanitarian dan hak asasi manusia internasional yang berlaku, secara cukup memberikan bantuan yang bersifat peka-usia dan peka-jenis-kelamin, tanpa diskriminasi, termasuk perawatan medis, dukungan rehabilitasi dan psikologis, serta untuk menyediakan penginklusian sosial dan ekonomi terhadap mereka.
2. Setiap Negara Pihak, sehubungan dengan area di bawah yurisdiksi atau kendalinya yang terkontaminasi akibat aktivitas yang berkaitan dengan uji coba atau penggunaan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya, wajib melakukan upaya yang diperlukan dan sesuai untuk pemulihan lingkungan dari area yang terkontaminasi tersebut.
3. Kewajiban dalam Ayat 1 dan 2 tersebut di atas tidak mengesampingkan tugas dan kewajiban Negara lain mana pun berdasarkan hukum internasional atau perjanjian bilateral.

Pasal 7

Kerja Sama dan Bantuan Internasional

1. Setiap Negara Pihak wajib bekerja sama dengan Negara-Negara Pihak lainnya untuk memfasilitasi pengimplementasian Traktat ini.

2. Dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Traktat ini, setiap Negara Pihak memiliki hak untuk mencari dan menerima bantuan, apabila dimungkinkan, dari Negara-Negara Pihak lainnya.
3. Setiap Negara Pihak yang berada dalam posisi untuk melakukannya wajib memberikan bantuan teknis, material, dan finansial kepada Negara-Negara Pihak yang terkena dampak penggunaan atau uji coba senjata nuklir, untuk pengimplementasian Traktat ini lebih lanjut.
4. Setiap Negara Pihak yang berada dalam posisi untuk melakukannya wajib memberikan bantuan kepada korban penggunaan atau uji coba senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya.
5. Bantuan berdasarkan Pasal ini dapat diberikan, antara lain, melalui sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi atau lembaga internasional, regional atau nasional, organisasi atau lembaga nonpemerintah, Komite Internasional Palang Merah, Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, atau perhimpunan nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, atau secara bilateral.
6. Tanpa mengesampingkan tugas atau kewajiban apa pun lainnya yang mungkin dimilikinya berdasarkan hukum internasional, suatu Negara Pihak yang telah menggunakan atau melakukan uji coba senjata nuklir atau alat peledak nuklir apa pun lainnya bertanggung jawab untuk memberikan bantuan yang cukup kepada Negara-Negara Pihak yang terkena dampak, sebagai tujuan pemberian bantuan kepada korban dan pemulihan lingkungan.

Pasal 8

Pertemuan Negara-Negara Pihak

1. Negara-Negara Pihak wajib bertemu secara rutin untuk mempertimbangkan dan, apabila perlu, mengambil keputusan sehubungan dengan semua hal terkait penerapan atau pengimplementasian Traktat ini, sesuai dengan ketentuan yang relevan dan terkait upaya lebih lanjut untuk pelucutan senjata nuklir, termasuk:
 - a) Pengimplementasian dan status Traktat ini;
 - b) Upaya untuk penghapusan program-program senjata nuklir yang terverifikasi, terikat waktu, dan tidak tergantung, termasuk protokol tambahan dari Traktat ini;
 - c) Semua hal lain yang sesuai dan konsisten dengan ketentuan Traktat ini.
2. Pertemuan pertama Negara-Negara Pihak wajib diadakan oleh Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kurun waktu satu tahun setelah berlakunya Traktat ini. Pertemuan Negara-Negara Pihak selanjutnya wajib diadakan oleh Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dua tahun sekali, kecuali disepakati lain oleh Negara-Negara Pihak. Pertemuan Negara-Negara Pihak wajib mengadopsi aturan prosedurnya pada sesi pertamanya. Sebelum adanya adopsi tersebut, aturan prosedur konferensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa untuk menegosiasikan instrumen yang mengikat secara hukum untuk melarang senjata nuklir, yang mengarah kepada penghapusannya secara menyeluruh, wajib berlaku.

3. Pertemuan luar biasa Negara-Negara Pihak wajib diadakan, apabila dianggap perlu, oleh Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, berdasarkan permintaan tertulis dari Negara Pihak mana pun sepanjang permintaan tersebut didukung oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah Negara-Negara Pihak.

4. Setelah kurun waktu lima tahun berlakunya Traktat ini, Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengadakan konferensi untuk mereviu pelaksanaan Traktat ini dan kemajuan dalam mencapai tujuan Traktat ini. Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengadakan konferensi reviu lanjutan dengan interval enam tahun untuk tujuan yang sama, kecuali disepakati lain oleh Negara-Negara Pihak.

5. Negara-Negara yang bukan pihak dari Traktat ini, beserta badan-badan terkait dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi atau lembaga internasional terkait lainnya, organisasi regional, Komite Internasional Palang Merah, Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta organisasi nonpemerintah yang terkait, wajib diundang sebagai pengamat untuk menghadiri pertemuan Negara-Negara Pihak dan konferensi reviu.

Pasal 9

Pembiayaan

1. Pembiayaan pertemuan Negara-Negara Pihak, konferensi reviu, dan pertemuan luar biasa Negara-Negara Pihak wajib ditanggung oleh Negara-Negara Pihak dan Negara-Negara bukan pihak dari Traktat ini yang berpartisipasi di pertemuan atau konferensi tersebut sebagai pengamat, berdasarkan skala penilaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan penyesuaian-penyesuaian.

2. Biaya yang dikeluarkan oleh Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengedarkan deklarasi berdasarkan Pasal 2, laporan berdasarkan Pasal 4, dan amendemen yang diusulkan berdasarkan Pasal 10 Traktat ini, wajib ditanggung oleh Negara-Negara Pihak berdasarkan skala penilaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan penyesuaian-penyesuaian.

3. Biaya yang berkaitan dengan pengimplementasian upaya verifikasi yang diperlukan berdasarkan Pasal 4 serta biaya yang berhubungan dengan pemusnahan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya, dan penghapusan program senjata nuklir, termasuk penghapusan

atau konversi semua fasilitas terkait senjata nuklir, ditanggung oleh Negara-Negara Pihak yang terhadapnya hal itu berlaku.

Pasal 10

Amendemen

1. Kapan pun setelah pemberlakuan Traktat ini, setiap Negara Pihak dapat mengusulkan amendemen terhadap Traktat. Teks amendemen yang diusulkan wajib dikomunikasikan kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengedarkannya ke semua Negara Pihak dan meminta pandangan mereka tentang apakah usulan yang dimaksud dapat dipertimbangkan. Apabila mayoritas Negara Pihak memberitahukan kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa paling lambat 90 hari setelah peredaran tersebut dilakukan, bahwa mereka mendukung pertimbangan usulan tersebut lebih lanjut, usulan tersebut wajib dipertimbangkan di pertemuan Negara-Negara Pihak selanjutnya atau di konferensi revidi, mana pun yang terjadi lebih dahulu.
2. Suatu pertemuan Negara-Negara Pihak atau konferensi revidi dapat menyepakati amendemen yang wajib diadopsi oleh suara mendukung dari mayoritas dua pertiga Negara-Negara Pihak. Sekretaris-Jenderal wajib mengomunikasikan setiap amendemen yang diadopsi kepada semua Negara Pihak.
3. Amendemen wajib mulai berlaku bagi setiap Negara Pihak yang menyampaikan instrumen ratifikasi atau penerimaan amendemen yang dimaksud dalam kurun waktu 90 hari setelah penyampaian instrumen ratifikasi atau penerimaan oleh mayoritas Negara Pihak pada saat adopsi. Untuk selanjutnya, amendemen itu wajib mulai berlaku bagi Negara Pihak mana pun lainnya 90 hari setelah penyampaian instrumen ratifikasi atau penerimaannya atas amendemen tersebut.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan di antara dua atau lebih Negara Pihak sehubungan dengan interpretasi atau penerapan Traktat ini, para pihak terkait wajib mengonsultasikan bersama dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian perselisihan melalui negosiasi atau melalui cara damai lainnya yang dipilih oleh para pihak berdasarkan Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Pertemuan Negara-Negara Pihak dapat berkontribusi terhadap penyelesaian perselisihan, termasuk dengan cara menawarkan jasa baik (*good offices*), mengimbau Negara-Negara Pihak terkait untuk memulai prosedur penyelesaian yang mereka pilih dan

merekomendasikan jangka waktu untuk prosedur apa pun yang disetujui, berdasarkan ketentuan yang relevan dalam Traktat ini dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 12

Universalitas

Setiap Negara Pihak wajib mendorong Negara-Negara yang bukan pihak dari Traktat ini untuk menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau bergabung pada Traktat ini, dengan tujuan kepatuhan universal semua Negara terhadap Traktat ini.

Pasal 13

Penandatanganan

Traktat ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York sejak tanggal 20 September 2017.

Pasal 14

Ratifikasi, Penerimaan, Persetujuan, atau Akses

Traktat ini tunduk pada ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan Negara-Negara penandatanganan. Traktat ini terbuka untuk akses.

Pasal 15

Pemberlakuan

1. Traktat ini wajib mulai berlaku 90 hari setelah instrumen kelima puluh dari ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau akses disampaikan.
2. Bagi setiap Negara yang menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau akses setelah tanggal penyampaian instrumen kelima puluh dari ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau akses, Traktat ini wajib mulai berlaku 90 hari setelah tanggal ketika Negara tersebut menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya.

Pasal 16

Reservasi

Pasal-Pasal dalam Traktat ini tidak tunduk pada reservasi.

Pasal 17
Jangka Waktu Dan Penarikan Diri

1. Traktat ini memiliki jangka waktu yang tidak terbatas.
2. Setiap Negara Pihak, dalam menjalankan kedaulatan nasionalnya, memiliki hak untuk menarik diri dari Traktat ini apabila ia memutuskan bahwa kejadian luar biasa yang berhubungan dengan perihal yang diatur dalam Traktat ini telah membahayakan kepentingan tertinggi negaranya. Ia wajib memberitahukan terkait penarikan dirinya kepada Penyimpan. Pemberitahuan tersebut wajib disertai pernyataan tentang kejadian luar biasa yang dianggapnya telah membahayakan kepentingan tertingginya.
3. Penarikan diri tersebut akan mulai berlaku 12 bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan penarikan diri tersebut oleh Penyimpan. Meskipun demikian, apabila periode 12 bulan telah lampau, Negara Pihak yang menarik diri tersebut adalah pihak dalam suatu konflik bersenjata, Negara Pihak tersebut akan tetap terikat oleh kewajiban dari Traktat ini dan dari protokol tambahan apa pun sampai ia tidak lagi menjadi pihak dalam suatu konflik bersenjata.

Pasal 18
Hubungan dengan Perjanjian Lainnya

Pengimplementasian Traktat ini tidak akan mengesampingkan kewajiban yang dilakukan oleh Negara-Negara Pihak sehubungan dengan perjanjian internasional yang telah ada, di mana Negara-Negara Pihak tersebut adalah pihak, sepanjang kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan Traktat ini.

Pasal 19
Penyimpan

Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan ini, ditunjuk sebagai Penyimpan Traktat ini.

Pasal 20
Teks Autentik

Teks bahasa Arab, Mandarin, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol dari Traktat ini adalah sama-sama autentik.

DIBUAT di New York, pada hari ketujuh bulan Juli, dua ribu tujuh belas.